



Maluku Investasi

PELOPOR INVESTASI DI MALUKU

TOPIK UTAMA

Dengan OSS RBA Menciptakan
"Surga" Investasi di Bumi Raja-Raja

PROFIL PTSP

Presiden Beri
Penganugerahan Layanan
Investasi Terbaik 2021
Untuk Maluku

INOVASI

Klinik OSS
dan LKPM



MALUKU JADI DAERAH DENGAN LAYANAN INVESTASI TERBAIK 2021

Provinsi Maluku
mendapat penghargaan
dari Presiden RI Joko Widodo
sebagai satu daerah
di Indonesia dengan
layanan investasi terbaik
pada tahun 2021,
Rabu (24/11/2021).



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu PROVINSI MALUKU





ANUGERAH LAYANAN INVESTASI

TERBAIK 2021



Ucapan syukur dan rasa terima kasih karena Provinsi Maluku mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai daerah dengan layanan investasi terbaik tahun 2021 kategori Penghargaan Khusus Indonesia Timur dari Presiden RI Bapak Joko Widodo.



Drs. Murad Ismail
Gubernur Maluku



MALUKU SURGA INVESTASI

MALUKU saat ini mempunyai peluang untuk menjadi daerah yang nyaman untuk berinvestasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku bertekad menjadikan daerah ini sebagai surganya investor.

Predikat sebagai provinsi dengan Layanan Investasi Terbaik Tahun 2021 di kawasan timur Indonesia, menyisihkan sembilan provinsi lain, dapat menjadikan indikator positif bahwa pintu untuk berinvestasi di Maluku terbuka seluas-luasnya.

Komitmen ini tentu didukung sejumlah faktor, diantaranya kesiapan SDM di pemerintahan yang profesional dan berintegritas, adanya potensi sumberdaya daerah yang potensial dan memiliki prospek ekonomi, adanya insentif dari pemerintah kepada para investor, termasuk perizinan yang kini menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, membuat semua urusan perizinan menjadi lebih mudah, cepat, terbuka, terintegrasi, dan legal.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Maluku pada khususnya, tidak menghentikan upaya pemerintah untuk terus melanjutkan berbagai agenda reformasi struktural. Semua aturan yang menghambat kemudahan berusaha terus dipangkas, dan di saat yang sama prosedur berusaha dan investasi terus dipermudah.

Semoga terbukanya pintu investasi dan menjadikan Maluku sebagai surganya tempat berusaha, semakin menjadikan investasi di Maluku semakin bergeliat, dan tentunya semua itu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku

M. Azis Tunny
Kepala Editor



Penerbit :

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROVINSI MALUKU

Redaksi :

Bidang Promosi Penanaman Modal
Jl. Pengeringan pantai Waihaong
No. 1 Ambon 92711 Indonesia

Telephone:

0911-353421

Fax:

0911-353421

Website:

<http://dpmtsp.malukuprov.go.id>

e-mail:

pmptsp@malukuprov.go.id

DAFTAR ISI



6

Topik Utama

OSS-RBA Ciptakan
"Surga" Investasi
di Maluku



14

Profil PTSP Provinsi Maluku

Presiden Anugerahi Layanan
Investasi Terbaik 2021
Untuk Maluku

INOVASI

18

POTENSI & PELUANG INVESTASI
PRIORITAS DI MALUKU

23

INFRASTRUKTUR
PENDUKUNG INVESTASI

28

GELIAT INVESTASI

31



44

WAWANCARA

"Maluku Harus
Menjadi Surga Buat
Investor"



47

NEWS

DPMPTSP Maluku
Ramaikan Pameran Invesda
Expo 2021 di Surabaya

TOPIK UTAMA

OSS-RBA Ciptakan “Surga” Investasi di Maluku





Mengenal, apa itu OSS?

OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem

elektronik yang terintegrasi.

Saat ini, perizinan di Indonesia harus diurus dan diterbitkan melalui sistem OSS.

Dengan berlakunya OSS versi 1.0 diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usahanya.

Hal penting dalam OSS diantaranya adalah :

1. Kemudahan pengurusan perizinan usaha untuk melakukan izin usaha.
2. Pemberian fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan.
3. Pemberian fasilitas terhadap para pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time; dan
4. Penyimpanan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bagaimana Cara Akses OSS?

Sebelum bisa mengakses sistem OSS, terlebih dahulu dilakukan pendaftaran dengan membuat dan melakukan aktivasi akun.

Berikut ini persyaratan untuk pendaftaran akun OSS :

1. NIK
2. NPWP
3. Alamat email
4. Memiliki usaha, baik usaha perorangan maupun badan usaha;
5. Melakukan pendaftaran. Para pelaku usaha wajib memiliki NIK, kemudian email dan informasi lainnya, konfirmasi pendaftaran dikirimkan ke email.
6. Melakukan aktivasi. Konfirmasi aktivasi akan dikirimkan email berisi username dan password untuk mengakses OSS.

Undang-Undang Cipta Kerja dan Lahirnya OSS RBA

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sejak tanggal 2 Juni 2021, dan sejak itu Pelaku Usaha sudah dapat mengakses Sistem OSS berbasis risiko melalui halaman oss.go.id.

Pelaku usaha dapat melakukan permohonan perizinan berusaha dan

pemenuhan komitmen atas Izin Usaha melalui OSS versi 1.1 hingga tanggal 25 Juni 2021. Bagi pemenuhan komitmen dan permohonan perizinan berusaha yang disampaikan ke Sistem OSS setelah tanggal 25 Juni 2021, akan diproses berdasarkan OSS-RBA.

Dalam kajian kami ada hal penting yang dapat diketahui dalam sistem OSS-RBA, yaitu:

1. Kategori Pelaku Usaha

Terdapat 2 (dua) macam kategori pelaku usaha, yakni UKM dan non-UKM. Pembagian kategori ini kemudian dibagi lagi berdasarkan skala usaha dibawah ini.

Kategori Pelaku Usaha



Online Single Submission (OSS)

berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

2. Skala Usaha

Skala Usaha Non UMK (Non Usaha Mikro dan Kecil)



PROFIL DPMPSTSP
PROFIL DPMPSTSP
PROVINSI MALUKU
PROFIL DPMPSTSP
PROVINSI MALUKU
PROVINSI MALUKU

KIPRAH DPMPTSP SEBAGAI PINTU MASUK INVESTASI



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah salah satu program pemerintah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan ke masyarakat, serta memperpendek proses pelayanan, guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

PTSP didefinisikan pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 sebagai pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Kehadiran PTSP adalah upaya mewujudkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan

hak-hak masyarakat dan investor untuk memperoleh pelayanan di bidang perizinan. Kehadiran PTSP diharapkan bermanfaat, tidak hanya bagi masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga pemerintah.

Bagi masyarakat, dengan adanya PTSP diharapkan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang jauh lebih baik, serta mendapat kepastian dan jaminan hukum atas formalitas usaha yang dimiliki. Bagi dunia usaha, keberadaan PTSP diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha.

Selain itu, adanya PTSP diharapkan agar pelaku dunia usaha dapat memperoleh manfaat dalam

bentuk efisiensi pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya sehingga membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan produktif. Di sisi lain, manfaat keberadaan PTSP bagi pemerintah adalah dapat mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

PTSP sebagai kelembagaan sendiri mengalami perjalanan yang cukup panjang. Beberapa aturan diterbitkan untuk mengatur kelembagaan PTSP. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 mengatur penyelenggaraan PTSP diwadahi dalam bentuk Badan/Kantor Mandiri.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 menyebutkan, penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 menyebutkan, penyelenggaraan PTSP diwadahi dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk Provinsi Maluku sendiri, kelembagaan PTSP diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Struktur organisasi PTSP sendiri diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 yang salah satu bagiannya adalah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan PTSP yang mandiri, pendelegasian kewenangan pun telah dilaksanakan Gubernur Maluku kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Maluku melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dikategorikan dinas daerah provinsi tipe "A" mempunyai Tugas Pokok yakni membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Kemudian Peraturan Gubernur Maluku Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP, dinas melayani 99 jenis perizinan yang ditandatangani Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur Maluku. Pergantian

dilakukan seiring adanya perubahan nomenklatur, struktur, dan penambahan objek perizinan dan non perizinan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Provinsi Maluku. Dengan adanya Pergub ini, kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang masih berada pada OPD teknis terkait tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pergub Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP, pada Bab III Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Gubernur mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha kepada Kepala DPMPTSP. Kewenangan pelayanan perizinan tersebut meliputi;

- a) Perizinan berusaha KBLI
- b) Perizinan berusaha Non KBLI
- c) Perizinan.

Pasal 2 menjelaskan bahwa, maksud diterbitkannya Pergub Nomor 64 Tahun 2021 adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait perizinan. Selain itu, tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan, dan peningkatan pelayanan di bidang perizinan.

Dalam pelaksanaan kewenangan, DPMPTSP dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh Gubernur. Tim teknis terdiri dari unsur terkait yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya. Tim teknis memiliki kewenangan melakukan verifikasi permohonan perizinan. DPMPTSP berpedoman pada standar pelayanan, dan standar operasional prosedur dalam melaksanakan kewenangannya.

Melalui DPMPTSP, Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha. Pembinaan tersebut antara lain; pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh pemerintah provinsi, atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Pelaku usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan. Apabila perbaikan tidak dilakukan, maka pemerintah provinsi dapat menindaklanjuti. Pengawasan yang dilakukan Gubernur melalui DPMPTSP meliputi standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitasi, insentif, dan kemudahan untuk Penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan.

Berikut rincian perizinan berusaha KBLI, non KBLI, dan perizinan berusaha pada DPMPSTSP Provinsi Maluku, yakni:

I PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN KBLI	
- Sektor Kelautan dan Perikanan	76
- Sektor Pertanian	145
- Sektor Lingkungan Hidup	13
- Sektor Kehutanan	25
- Sektor Kesehatan	11
- Sektor Transportasi	40
- Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	15
- Sektor Perindustrian	231
- Sektor Pariwisata	28
- Sektor Koperasi dan UKM	8
TOTAL	592
II PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA (NON-KBLI)	
- Sektor Kelautan dan Perikanan	7
- Sektor Pertanian	6
- Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	3
- Sektor Transportasi	40
- Sektor Kesehatan	5
- Sektor Ketenagakerjaan	2
- Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
TOTAL	65
III PERIZINAN NON BERUSAHA	
- Sektor Pendidikan	3
- Sektor Kesehatan	1
- Sektor Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1
- Sektor Sosial	3
- Sektor Transportasi	4
- Sektor Koperasi dan UKM	3
- Sektor Kelautan dan Perikanan	4
- Sektor Pariwisata	1
- Sektor Pertanian	7
- Sektor Kehutanan	3
- Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	6
- Sektor Perindustrian dan Perdagangan	2
TOTAL	38
I PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN KBLI	592
II PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA (NON-KBLI)	65
III PERIZINAN NON BERUSAHA	38
TOTAL	695

Presiden Anugerahi Layanan Investasi Terbaik 2021 Untuk Maluku

JAKARTA,- Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail, kembali mendapat apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Pusat. Di pengujung tahun ini, Presiden RI Joko Widodo, kembali menyerahkan langsung penghargaan kepada Maluku. Penghargaan Anugerah Layanan Investasi Terbaik tahun 2021 itu diserahkan langsung Presiden kepada Provinsi Maluku, disela-sela acara pembukaan Rakornas Investasi di Ballroom The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, pada Rabu (24/11). Selain Maluku, tiga provinsi lain juga mendapat penganugerahan serupa yakni, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Penghargaan untuk Maluku tersebut tidak diterima oleh Gubernur, namun Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno mewakili Pemerintah Provinsi Maluku. Sesuai ketentuannya, penganugerahan itu diberikan berdasarkan penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu juga menyangkut Percepatan Pelayanan Berusaha dengan Kriteria Inovasi Sangat Baik tahun



2021. Hasil penilaian itu terlampir dalam keputusan Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 139 Tahun 2021. Maluku dianugerahi penghargaan khusus untuk kategori Indonesia Timur.

"Mewakili Bapak Gubernur, saya menerima penghargaan anugerah layanan investasi terbaik tahun 2021, yang diserahkan langsung oleh Presiden RI," kata Wagub di Jakarta, Rabu (24/11). Dengan adanya penganugerahan tersebut, Orno menuturkan, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus berusaha untuk memudahkan segala izin usaha yang akan masuk di Provinsi Maluku. Cara itu diharapkan banyak investor yang akan tertarik untuk masuk dan membuka usahanya di Maluku. Dengan demikian, maka akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

"Penghargaan dan apresiasi ini kami persembahkan khusus untuk seluruh rakyat Maluku," tandasnya.

Penghargaan itu, lanjut Wagub, merupakan prestasi bagi Maluku yang secara tidak langsung memberikan pesan bahwa Maluku merupakan provinsi yang ramah bagi investor, terkait dengan izin usaha dan administrasi yang sangat mudah dan dikelola secara profesional.

"Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkerja keras, khususnya DPMPTSP Provinsi Maluku. Kedepan, proses perizinan harus dipermudah, dengan tetap dilakukan secara profesional," tandasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku, Suryadi Sembirin, mengatakan, keberhasilan ini merupakan terjemahan dari RPJMD Maluku dan Visi-Misi Gubernur Maluku yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan, dan berdaulat atas gugusan kepulauan.

"Salah satu dari misi Bapak Gubernur sendiri yakni meningkatkan suasana kondusif untuk





investasi di Maluku,” kata Suryadi.

Menurut dia, tugas selanjutnya adalah bagaimana dirinya harus bekerja keras guna mewujudkan realisasi investasi.

“Pesan Pak Presiden tadi, agar daerah berusaha meningkatkan realisasi investasi. Beliau juga berpesan, jangan hanya (investasi, red) yang besar-besar saja, tapi investasi kecil seperti UMKM juga harus dihidupkan,” ujarnya.

Presiden Jokowi, dalam sambutannya, mengaku, senang dengan komitmen kementerian lembaga dan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait pelayanan pada investasi. Dikatakannya, urusan pelayanan, perizinan dan lainnya memang harus dilakukan untuk menggaet minat investor untuk datang ke Indonesia.

“Saya senang, ada kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten/kota yang menerima





anugerah untuk investasi, baik realisasi maupun urusan pelayanan perizinan. Investor itu dilayani dengan baik saja belum tentu mau, apalagi yang tidak dilayani. Sebab itu, pola lama harus ditinggalkan. Berikan layanan terbaik pada semua investor, baik yang kecil, sedang maupun besar. Semua harus dilayani dengan baik,” katanya.

Investasi, lanjut Jokowi, menjadi salah satu kunci percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor ini lanjut dia, bisa memberikan dampak besar dalam berbagai sektor kehidupan lainnya.

“Dengan adanya investasi, peredaran uang akan semakin besar. Itu menimbulkan efek lain, daya beli masyarakat naik, konsumsi masyarakat naik, dan pertumbuhan ekonomi juga naik,” jelasnya.

Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Investasi dan BKPM-RI ini diikuti para Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Kepala DPMPSTP seluruh Indonesia. Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju juga hadir yakni Menko Maritim dan Investasi, Menteri Investasi/ BKPM-RI, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM.

(*)

INOVASI

DPMPTSP Maluku Buka Klinik OSS dan LKPM Online

Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS-RBA) sejak diluncurkan tanggal 9 Agustus 2021, konsentrasi perizinan berusaha berubah arah menjadi berbasis risiko, yakni risiko yang ditimbulkan atas kegiatan berusaha yang dijalankan dan diajukan untuk memperoleh Perizinan Berusaha.

Seiring berjalannya waktu, masih banyak yang belum memahami aplikasi sebagai pelaksana dari lahirnya UU Cipta Kerja, yakni aplikasi Kementerian Investasi/BKPM RI yang dikenal dengan nama OSS-RBA. Setelah memperoleh izin sesuai tingkat resiko, maka ada yang berkawajiban melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5



terebosan inovasi yakni meluncurkan program “Klinik OSS dan LKPM Online”

Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku, Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si mengatakan, inovasi “Klinik OSS dan LKPM Online” bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan bagi para pelaku usaha tentang penyampaian dan pelaporan LKPM Online dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) sesuai ketentuan perizinan berusaha, atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berdampak dalam meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki perizinan Berusaha dan telah didaftarkan secara online melalui OSS. Selain itu, tujuannya untuk meningkatkan jumlah pelaporan kegiatan penanaman modal pelaku usaha atau realisasi investasinya di Maluku.

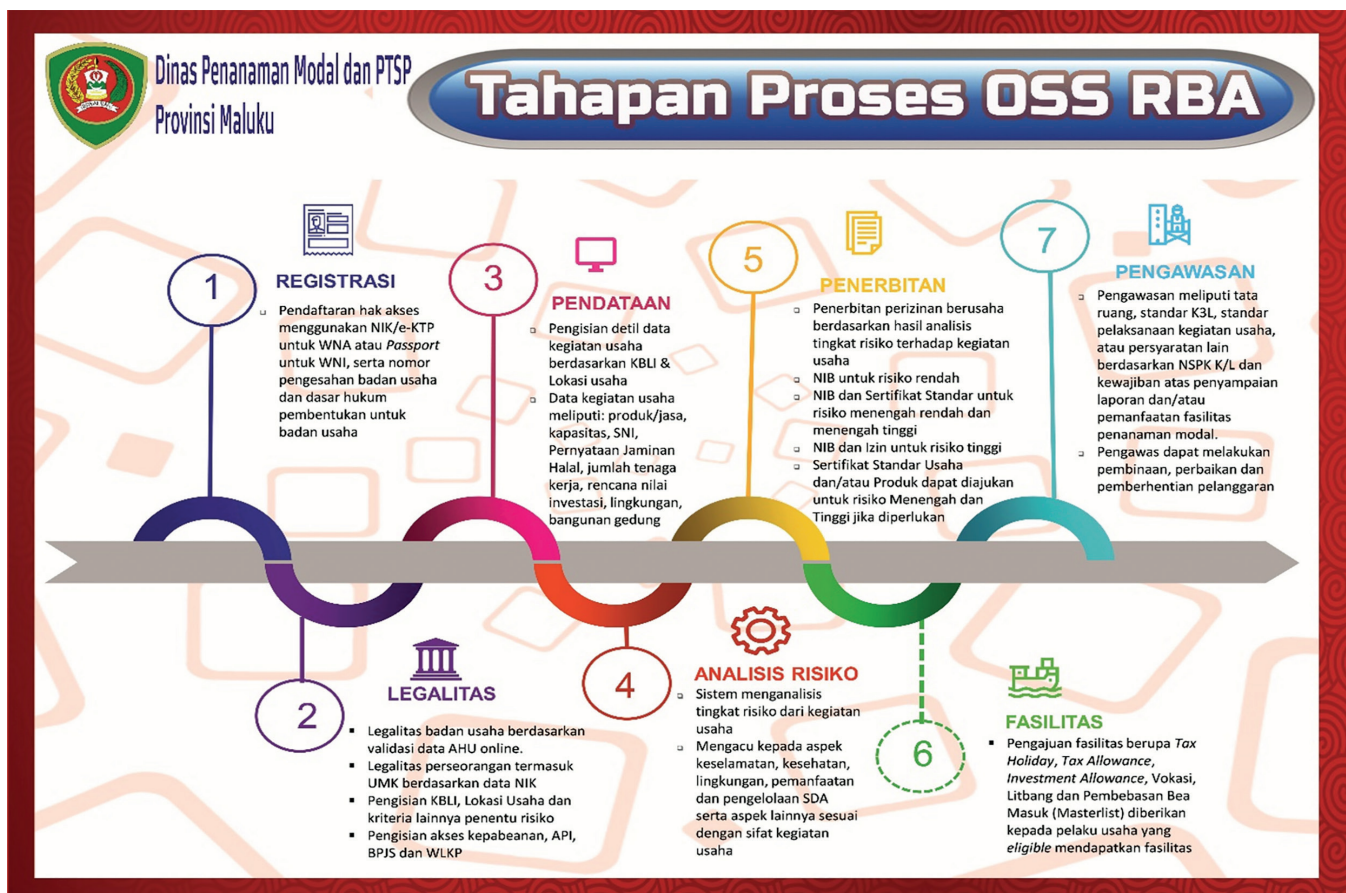
Dikatakannya, kualitas pelayanan yang baik akan berpengaruh bagi setiap pelaku usaha yang datang, dan pastinya akan senang jika mendapat pelayanan yang baik pula,” ujarnya.

Dengan kualitas pelayanan yang baik, lanjut dia, akan tercipta kemajuan berusaha di Maluku. Aktifitas “Klinik” ini sangat mendapatkan apresiasi dari para pelaku usaha, karena mereka yang tadinya tidak memahami menjadi paham dengan kehadiran sistem yang baru tersebut.

Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBKPM 5/2021), LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka 20 PBKPM 5/2021).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku dalam peningkatan layanan publik dan kaitan memberikan pemahaman dan wawasan bagi para pelaku usaha tentang penyampaian dan pelaporan LKPM Online dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA), melakukan sebuah

Dari setiap pengunjung klinik yang datang ke kantor DPMPTSP Provinsi Maluku, yang berkonsultasi tentang Sistem OSS-RBA dan LKPM Online cukup antri untuk mendapatkan pemahaman tentang SOP, yakni dengan tahapan Proses OSS-RBA yakni sebagai berikut:



DPMPTSP Provinsi Maluku dalam tahapan tersebut, hanya mengarahkan setiap pelaku usaha yang datang untuk berkonsultasi kemudian diharapkan setiap pelaku usaha dapat mengisi sendiri tahapan tersebut, karena dalam tahapan informasi untuk terbitnya NIB yang diminta oleh sistem hanya pelaku usaha yang mengetahuinya sendiri.

Dengan berjalannya usaha yang dimiliki pelaku usaha, terjadi penambahan alat produksi atau adanya perluasan usaha, atau terdapat beberapa kendala yang didapatkan selama berusaha, kemajuan dan permasalahan yang didapatkan selama berusaha dalam kurun waktu tertentu wajib dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online secara berkala sesuai tingkat resiko yang didapatkan saat mendaftarkan pada system OSS RBA sebelumnya.



Untuk alur tata-cara pelaporan LKPM Online tersebut terdapat 2 jenis yakni Tahap Konstruksi dan Tahap Produksi yang dapat dilihat pada alur berikut ini :



Pada tahapan ini, pelaku usaha diminta untuk masuk (log-in) ke akun OSS pelaku usaha kemudian memilih apsih Pelaporan LKPM, kemudian klik pada kolom penambahan LKPM guna membuat laporan LKPM triwulan pelaporan, kemudian pilih bidang usaha sesuai KBLI yang ingin dilaporkan dan meng-input data realisasi modal tetap dan modal kerja triwulan pelaporan, kemudian input data penyerapan tenaga kerja pada triwulan pelaporan dan selanjutnya input tenaga operator yang melaporkan LKPM.



Pada tahapan ini, bagi pelaku usaha yang telah berproduksi dapat mengisi LKPM Online secara benar dan tepat sesuai yang diarahkan pada SOP tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online.

Dengan demikian, akan tercapai tujuan sebagaimana filosofi pelayanan yakni mudah, murah, cepat, transparan, dan legal.

Mudah, pelaku usaha tak perlu ke kantor dalam hal akses, tidak rumit, dan pengajuan bisa dimana saja, Murah, biaya terjangkau dan sesuai. Cepat, yakni pelaku usaha akan mendapat barcode, apabila lengkap maka cepat diproses sesuai dengan standar pelayanan. Transparan, semua proses yang dilakukan berlangsung transparan dan akuntabel. Dan Legal, semua proses melalui kelembagaan OSS sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku. (*)

DPMPTSP Terapkan Tandatangan Elektronik



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku saat ini telah menerapkan tanda tangan elektronik dalam pelayanan terhadap masyarakat di dalam sistemnya.

Tanda tangan elektronik telah diatur dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 yang didalamnya disebutkan bahwa Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi

Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya, yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi, tidak akan ada lagi izin yang tertunda prosesnya karena melalui cara ini pejabat bisa melakukan legalisasi dokumen dari mana saja dengan tetap aman dan sah menurut hukum.

Pemanfaatan sertifikat elektronik ini menciptakan pelayanan pemerintah yang mudah diakses, cepat dalam pemrosesan data, jaminan otentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan, serta mampu mendorong tersedianya data yang akurat sehingga kepercayaan para pelaku usaha di Maluku selaku pengguna layanan dapat meningkat karena pemohon tidak perlu lagi datang ke DPMPTSP untuk mengambil surat izin. Para pelaku bisa mencetak seniri surat izin, dimanapun dan kapanpun. (*)

POTENSI & PELUANG INVESTASI PRIORITAS DI MALUKU

AMBON NEW PORT DUKUNG KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN LIN

Lambung Ikan Nasional (LIN) merupakan program pemerintah yang menargetkan Maluku sebagai pusat industri pengolahan ikan di Kawasan Indonesia Timur. Demi suksesnya program tersebut, perlu dibangun infrastruktur yang memadai. Salah satunya, pemerintah akan membangun Ambon New Port atau Pelabuhan Ambon Baru.

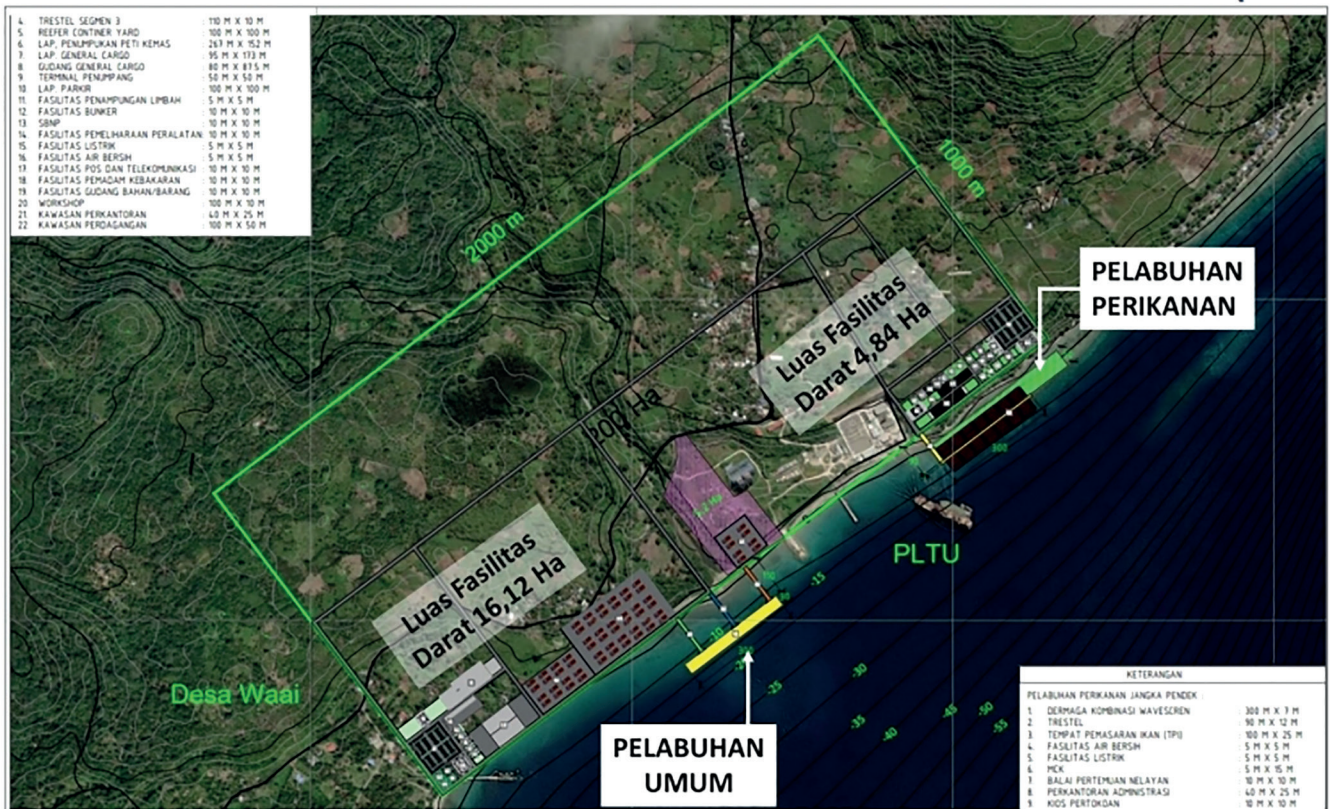
Pelabuhan tersebut ditargetkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2023. Pembangunan dan pengembangan jangka pendek pelabuhan akan menelan biaya sebesar Rp.1,41 triliun. Rencananya, pelabuhan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 700 hektar. Industri perikanan yang dibangun

bertujuan untuk menampung sumber daya ikan yang ada di tiga wilayah pengolahan perikanan (WPP) di Maluku.

Pembangunan Ambon New Port sangat diperlukan guna mengintegrasikan pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo dari wilayah Indonesia timur, dimana Maluku menjadi Hub-nya. Karena itu, perencanaan pembangunan Ambon New Port harus didukung dan mendapat perhatian serius dari setiap pihak yang terlibat.

Ambon New Port mengusung konsep pelabuhan terintegrasi, memiliki fungsi pelayanan antara lain untuk terminal peti kemas internasional dan domestik,

RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN AMBON BARU (INISIAL)



RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN AMBON BARU (INISIAL)



terminal kapal ro-ro, pelabuhan perikanan, pasar ikan bertaraf internasional, kawasan industri logistik, terminal LNG dan/atau power plant (pembangkit listrik).

Sinergi yang lebih serius juga ditunjukkan dengan penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman pada tanggal 28 Juni 2021 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna mengembangkan Ambon New Port. Penandatanganan MoU itu tentang Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) Pembangunan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Maluku dalam rangka mewujudkan Maluku sebagai LIN.

Kesepahaman itu menjadi landasan kerjasama antara KKP dan Kemenhub dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PJPK untuk pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan ikan terintegrasi, infrastruktur pendukung, serta dukungan teknis dan non-teknis lainnya di Provinsi

Maluku.

Dalam MoU tersebut, KKP berperan mewujudkan tatanan Kepelabuhanan Perikanan Nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global, untuk menunjang pembangunan perikanan di Indonesia. Sementara Kemenhub mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, termasuk mewujudkan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Pelabuhan Laut di Indonesia.

KKP sudah merancang mekanisme penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yang termasuk dalam area Lumbung Ikan Nasional.

Dalam rancangan tersebut, jumlah tangkapan akan berbasis pada kuota dan kapal-kapal

penangkap harus mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang sudah ditentukan KKP.

Terdapat delapan pelabuhan perikanan di sekitar WPPNRI 718 yang akan mendukung peran Ambon New Port sebagai pelabuhan utama terintegrasi. Ambon New Port akan menjadi pintu gerbang ekspor produk perikanan yang dihasilkan dari kawasan LIN.

Sementara untuk pemenuhan

pasar domestik, akan disiapkan kapal kontainer pendingin sebagai pengangkut hasil perikanan dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitar LIN menuju wilayah tujuan. Skema ini juga untuk mendukung program tol laut yang digaungkan pemerintah.

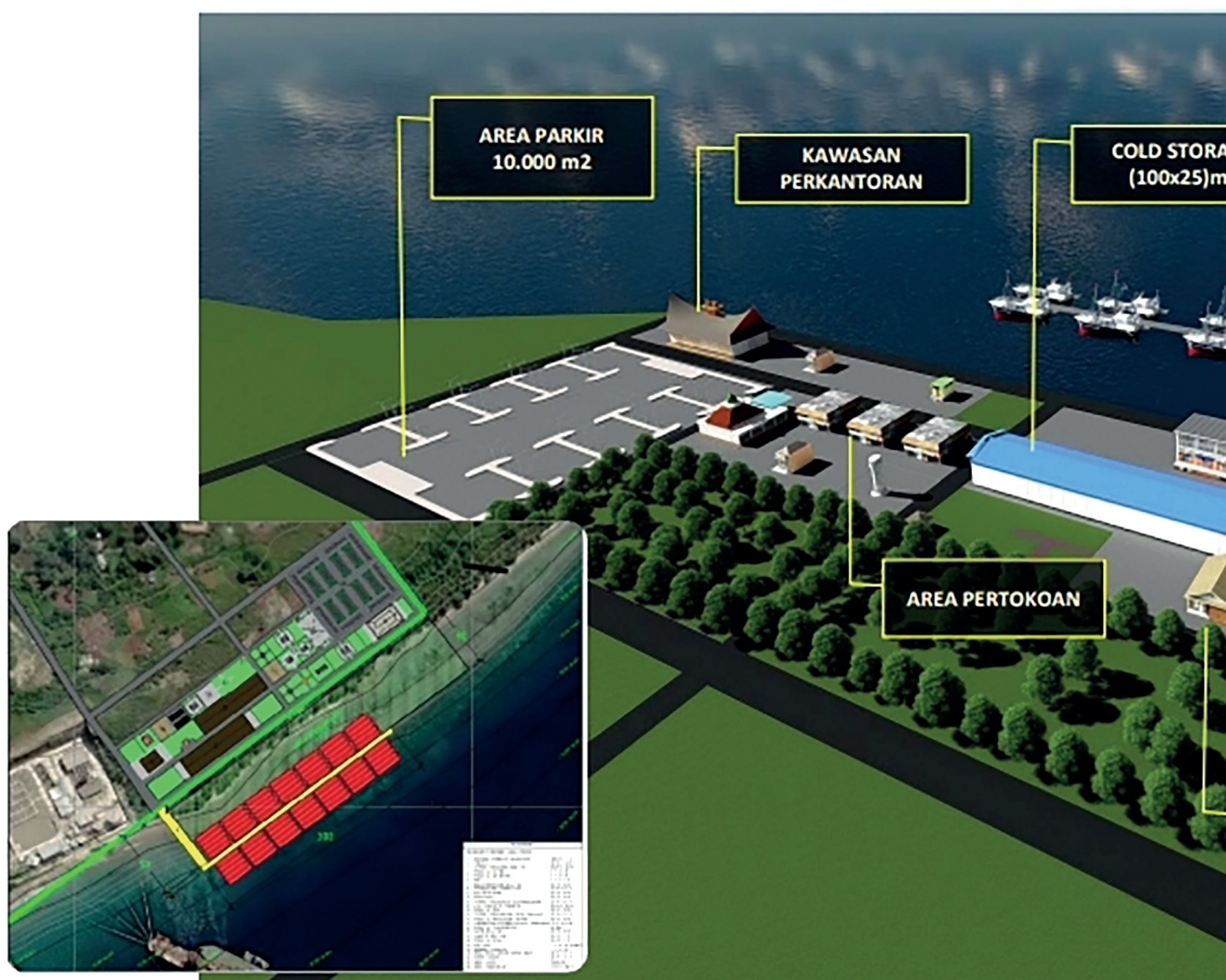
Untuk memastikan skema tersebut berjalan dengan baik, KKP akan memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan ruang laut dengan menggunakan

teknologi berbasis satelit.

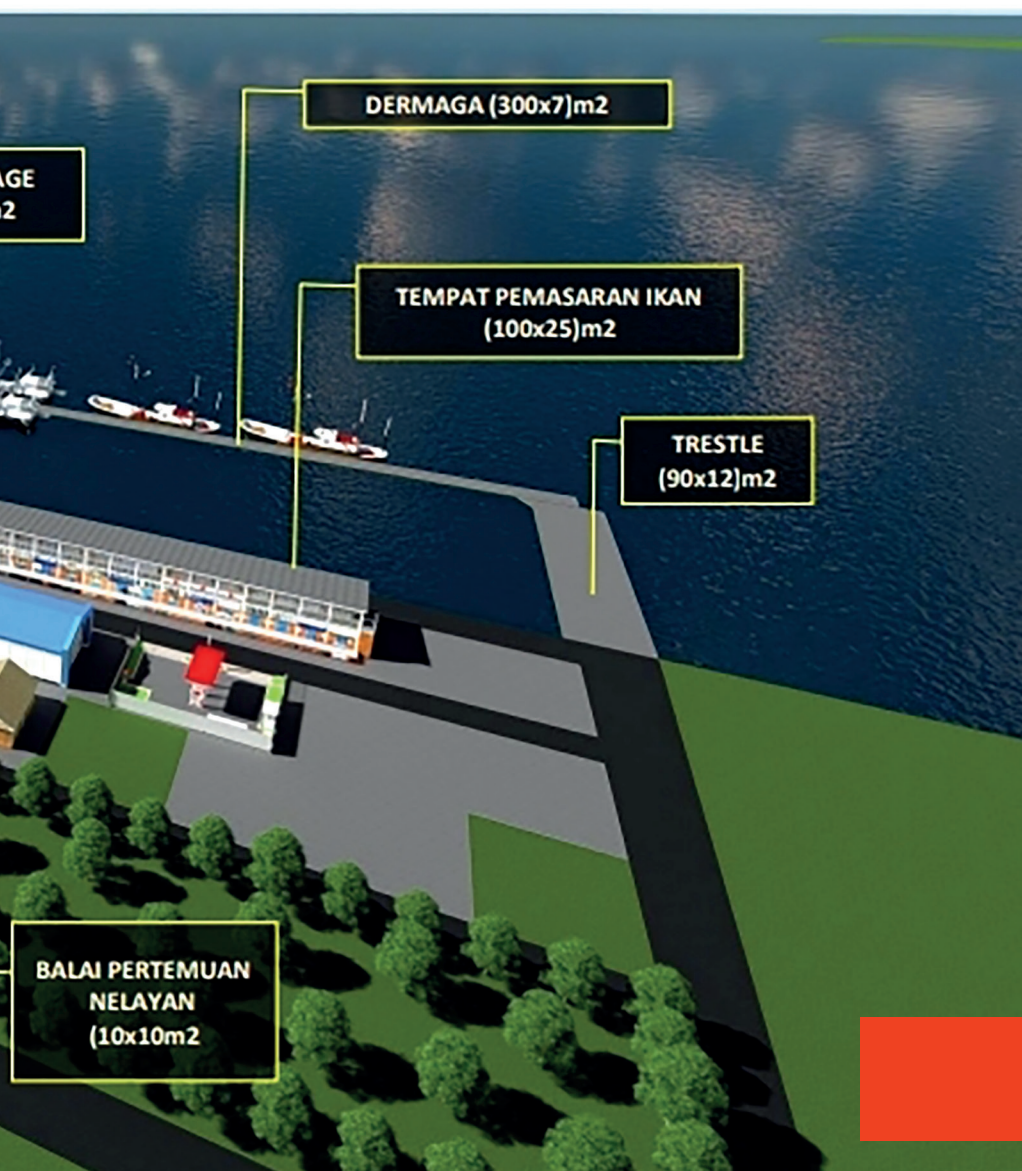
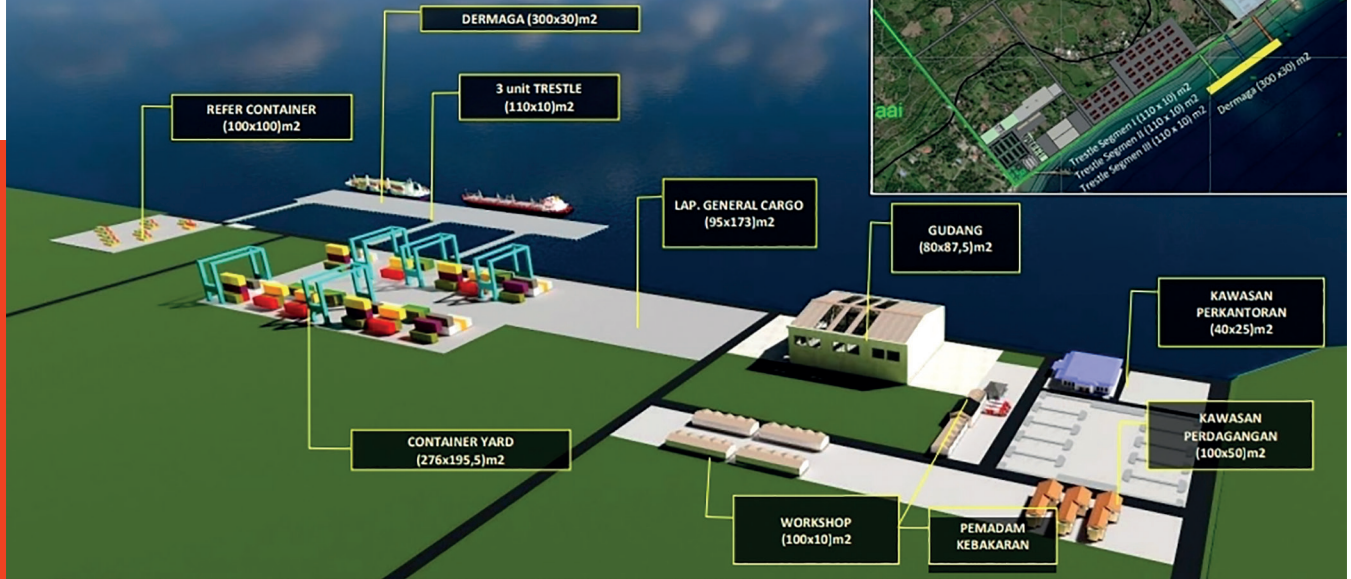
Sistem ini tidak sebatas memantau pergerakan kapal penangkap ikan pengguna VMS maupun yang tidak, tapi juga dapat memonitoring stok ikan, tumpahan minyak, kondisi terumbu karang, kawasan budidaya udang dan rumput laut, hingga memantau kawasan-kawasan pesisir yang terintegrasi.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)

PELABUHAN AMBON BARU PELABUHAN PERIKANAN



PELABUHAN AMBON BARU PELABUHAN UMUM



Indonesia, Moh Abdi Suhufan, menyatakan, pemerintah perlu memastikan adanya ketersediaan pendanaan untuk mewujudkan realisasi program LIN serta perlu dipikirkan manajemen pasca pembangunan agar tidak ada proyek infrastruktur yang mangkrak.

"Investasinya (untuk mewujudkan LIN) akan sangat mahal, dan KKP harus memastikan ketersediaan pendanaan," kata Suhufan.

Sedangkan Peneliti DFW, Subhan Usman, mengingatkan agar proyek Maluku sebagai LIN dapat merangkul pula nelayan kecil di provinsi Maluku maupun Maluku Utara.

Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk para nelayan tradisional, maka kedepannya akan terbangun semangat bersama yang konsisten dan inklusif dalam mewujudkan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

(*)

INFRASTRUKTUR
**INFRASTRUKTUR
PENDUKUNG INVESTASI**
INFRASTRUKTUR
PENDUKUNG INVESTASI

KISAH PULAU RUN YANG DITUKAR DENGAN MANHATTAN

Harum buah Pala di Kepulauan Banda, Maluku, memikat bangsa asing untuk dating berdagang dan meraup untung di pasar dunia pada abad ke-17. Buah pala pada zaman itu digunakan sebagai bumbu sekaligus pengawet makanan. Harganya bahkan lebih mahal dari emas.

Untuk menguasai rempah-rempah Maluku, kemudian terjadi salah satu kesepakatan tukar guling termahal dalam sejarah perdagangan dunia oleh Belanda dan Inggris atas salah satu pulau di Indonesia, yakni Pulau Run di Banda. Pada tanggal 31 Juli 1667 di Kota Breda, Belanda, Belanda bersama Inggris menandatangani Perjanjian Breda yang salah satu isinya adalah mengenai kesepakatan tukar guling tersebut.

Pasal 3 Perjanjian Breda memutuskan Pulau Run di Kepulauan Maluku yang sebelumnya dikuasai Inggris, menjadi milik Belanda. Adapun Pulau Manhattan di Amerika yang merupakan koloni Belanda, kemudian resmi menjadi hak Inggris. Pulau Manhattan itu dulunya disebut sebagai Nieuw Amsterdam.

Sejarah salah satu kesepakatan tukar guling termahal di dunia itu bermula dari sebuah komoditas buah dari tanaman bernama pala atau bahasa Latinnya adalah *Myristica fragrans*. Jauh sebelum kalender Masehi dirujuk, pala telah menjadi komoditas lukratif yang menggerakkan perniagaan lintas benua. Pamornya mungkin lebih dari minyak

bumi atau karet pada zaman industri.

Sejarah panjang kolonialisasi di Indonesia, tidak bisa mengabaikan posisi Pulau Run itu sendiri. Namun, pulau kecil dari gugusan Kepulauan Banda di Kabupaten Maluku Tengah yang dulu berjaya itu, sekarang seakan terlupakan oleh dunia.

Pulau ini memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk budidaya rempah seperti cengkeh dan pala. Ketika Belanda menemukan kepulauan Banda, mereka membentuk perusahaan VOC dengan tujuan untuk memonopoli rempah-rempah. Pada 1616, Inggris berhasil menguasai pulau Run. Di sana, Inggris membuat koloni pertama sekaligus membentuk English East India Company.

Keberhasilan Inggris tersebut menjadi penghalang bagi VOC untuk memonopoli perdagangan rempah. Akhirnya pada tahun 1677, kedua negara menggelar kesepakatan melalui Perjanjian Breda, untuk tukar guling dan memutuskan Pulau Run menjadi milik Belanda, sementara pulau Manhattan (sekarang New York) menjadi milik Inggris.

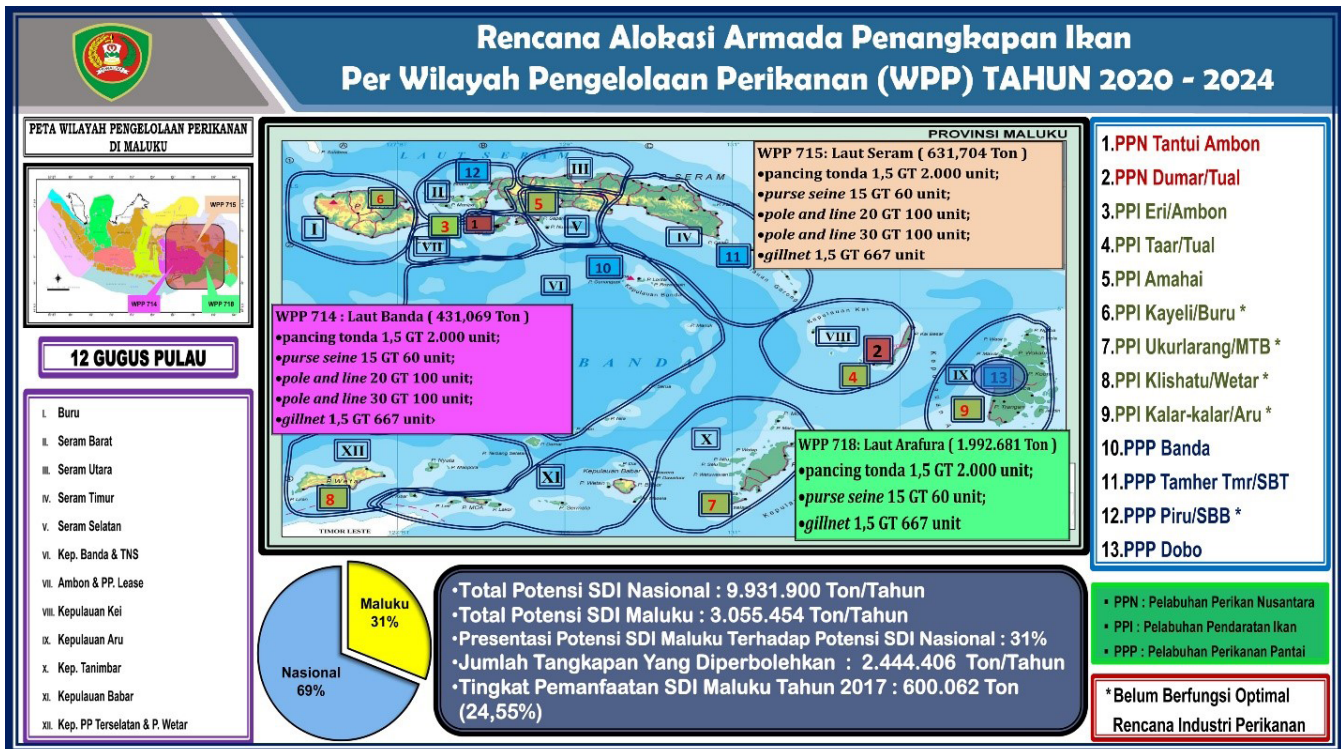
Beberapa Abad kemudian, nasib kedua pulau itu sangat jauh berbeda. Pulau

Manhattan yang dulunya hanya pos dagang bulu binatang, menjelma sebagai salah satu kota paling maju di dunia. Manhattan menjadi pusat ekonomi global yang berada di jantung kota New York. Sementara Pulau Run menjadi pulau terpencil dikarenakan oleh kemunduran perdagangan dan anjloknya harga rempah sejak abad ke-18.

Pulau Run berjarak sekitar 17 kilometer dari Pulau Banda. Di Pulau Run terdapat satu pelabuhan rakyat, dua penginapan, dan satu puskesmas pembantu. Untuk kelistrikan, terdapat PLTD dengan kapasitas 60 Kw dan 100 Kw (menyala hanya 12 jam sehari), dan telekomunikasi memiliki BTS dengan sinyal seluler 4G. (*)



POTENSI INVESTASI DI SEKTOR PERIKANAN MASIH TERBUKA LUAS



Maluku memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar. Hal ini menjadikan Maluku sebagai surga investasi di sektor perikanan. Dalam mendukung investasi di sector ini, dibutuhkan infrastruktur yang memadai.

Fasilitas pelabuhan yang ada di Maluku terdiri atas 2 PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara), 7 PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan), dan 4 PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai), tersebar di 12 gugus pulau. Salah satu pelabuhan terbesar adalah PPN Ambon, yang dibangun tahun anggaran 1984-1985 dengan sumber dana berasal dari APBD.

Saat itu kelasnya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau Pelabuhan Type D. Pembangunan dilanjutkan tahun 1990/1991 sampai dengan 1995/1996 dengan sumber dana berasal dari APBN, dan LOAN APBD INP – 22. Statusnya kemudian sebagai Pelabuhan Pantai atau Pelabuhan Type C dibawah Dinas Perikanan Provinsi Maluku.

Tahun 2000 ditingkatkan kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Pelabuhan Type B) dengan status sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan.

Maluku memiliki potensi kekayaan laut yang besar. Hal ini menjadikan Maluku sebagai surga investasi di sektor perikanan. Guna meningkatkan efektivitas dalam aspek ekonomi, kesehatan, infrastruktur serta upaya menekan angka kemiskinan di Maluku, maka dibutuhkan satu metode untuk merealisasikan hal tersebut sebagaimana kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan.

Terkait hal itu, telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan 11 Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku, untuk menggunakan metode berdasarkan gugus pulau. Terdapat 12 gugus pulau di Provinsi Maluku yakni; Buru, Seram Barat, Seram Utara, Seram Timur, Seram Selatan, Kepulauan Banda dan TNS, Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Pulau-pulau Terselatan, dan Pulau Wetar.

Hasil laut di Provinsi Maluku sangat berlimpah, namun sayangnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya jumlah armada kapal penangkapan, cold storage, pabrik es, dan sebagainya. Karena itu, terbuka peluang investasi di bidang perikanan tangkap yang dapat dimanfaatkan oleh para investor.

Kebutuhan armada penangkapan ikan tahun 2020-2024 :

Spesifikasi	Jmlh Unit
Armada Pancing Tonda 1,5 GT	6000 unit
Armada Jaring Lingkar 15 GT	180 unit
Armada Pole dan Line 20 GT	200 unit
Produksi Pole dan Line 30 GT	200 unit
Armada Jaring Insang 1,5 GT	2000 unit
Keramba Jaring Apung HDPE 3mx3m, 4 kotak	1000 unit
Teknologi Budidaya	1000 unit

Kebutuhan cold storage sebanyak 126 unit tahun 2020-2024 yang tersebar pada 12 gugus pulau, terdiri atas 56 unit kapasitas 200 Ton, 42 unit kapasitas 100 Ton, dan 28 unit kapasitas 50 ton.

Kebutuhan pabrik es sebanyak 32 unit tahun 2020-2024 yang tersebar pada 12 gugus pulau, terdiri dari 3 unit kapasitas 50 ton, 9 unit kapasitas 20 ton, dan 20 unit kapasitas 10 ton.

GELIAT INVESTASI



Kunjungi Pameran UMKM di ACC Ambon

Sandiaga Ajak Pelaku UMKM Gercep, Geber, dan Gaspol

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, berkunjung ke Ambon City Center (ACC) di Kota Ambon untuk melihat langsung pameran UMKM pada Jumat, 29 Oktober 2021. Saat berdialog dengan para pelaku UMKM, Sandi mengatakan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang bangkitnya ekonomi Indonesia di tengah pandemi.

Ia percaya bahwa selalu ada potensi dan peluang dari setiap krisis yang terjadi. Menurutnya, cara untuk membangkitkan UMKM dimasa pandemi ini adalah dengan gerak cepat dan mengikuti perubahan yang ada, serta harus memaksimalkan menggarap

semua potensi yang ada.

Sandiaga mengatakan perlu ditingkatkannya keterampilan melalui 3G, yakni Gercep (Gerak Cepat), Geber (Gerak Bersama), dan Gaspol (Garap Semua Potensi). Tiga hal tersebut dapat terealisasi bila ada komitmen dari UMKM serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UMKM.

“Dengan sinergi dan kolaborasi yang optimal, UMKM Indonesia akan lebih cepat bertumbuh dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” katanya mantap.

Di era digitalisasi sekarang ini, UMKM kata Sandiaga, harus dapat

memanfaatkan teknologi internet untuk berjualan. Dikatakannya, akselerasi dari transformasi digital masyarakat harus dibantu, difasilitasi oleh pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan. Ia mengajak para UMKM tidak hanya berjualan online, tapi juga dapat menciptakan konten kreatif.

Semua UMKM, lanjut dia, sudah harus masuk ranah digital terlepas dari apapun bidang usahanya. Berdasarkan survei Bank Indonesia, sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi. Dari besaran itu, sebanyak 93,2 persen mengalami penurunan omzet, sedangkan 12,5 persen lainnya tidak terdampak karena sudah berjualan online. (*)

Sediakan Akses Pasar Bagi Produk UMKM

Dekranasda Maluku Siapkan Gerai di Bandara Pattimura Ambon



Maluku, dengan menyediakan satu buah gerai di bandara Pattimura Ambon, dimana gerai itu akan mempromosikan produk-produk andalan UMKM Maluku.

Ia berharap, nantinya baik masyarakat luar, maupun orang Maluku sekalipun bisa mengetahui produk khas Maluku. Selaku Ketua Dekranasda Maluku, ia juga menjelaskan saat dirinya menyambangi kelompok usaha masyarakat Noaulu di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, mulai dari pembuatan keranjang rajut dari bambu, dan sandal-sandal yang dibuat dari anyaman, la menambahkan pihaknya kedepan nanti akan membantu penyediaan bahan baku, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat di sana agar dapat mengelola potensi yang juga ada seperti jahe, agar dapat diolah menjadi permen, minuman, dan sebagainya, sehingga memiliki nilai jual.

Sebelum mengakhiri wawancaranya, istri Gubernur Maluku ini mengatakan, "Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan katong (kita) siapa lagi". Dirinya berjanji akan fokus untuk memajukan UMKM di Maluku agar kelak bisa sejajar, atau bahkan lebih baik dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. (*)

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Gerai Baileo Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maluku di Bandara Pattimura Ambon, maka dilaksanakan rapat yang bertempat di Gedung Dekranasda Provinsi Maluku, Kamis 30 September 2021.

Rapat dipimpin Ketua Dekranasda

Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, dihadiri oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku, dan dihadiri Pimpinan OPD terkait, unsur Perbankan, dan pihak Angkasa Pura.

Dalam wawancaranya, Ina Latu Maluku itu menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus memberi kesejahteraan kepada UMKM di



Area Cafe & Ruang Xpora BNI



Perspektif di Area Kanan Galeri
dengan Ruang Expora, Cafe dan Posisi Sculoture Kora Ulu
serta Panel Pembatas

TAMPAK SAMPING KIRI GALERI BAILEO UMKM MALUKU



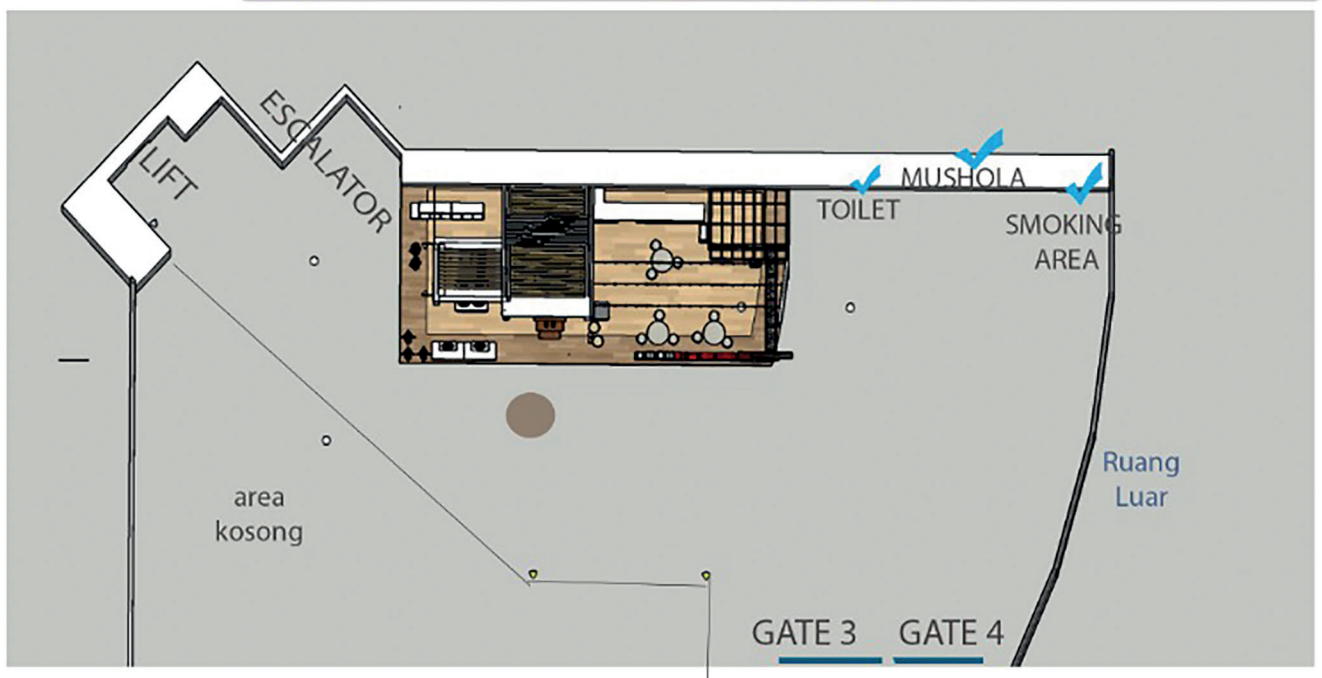
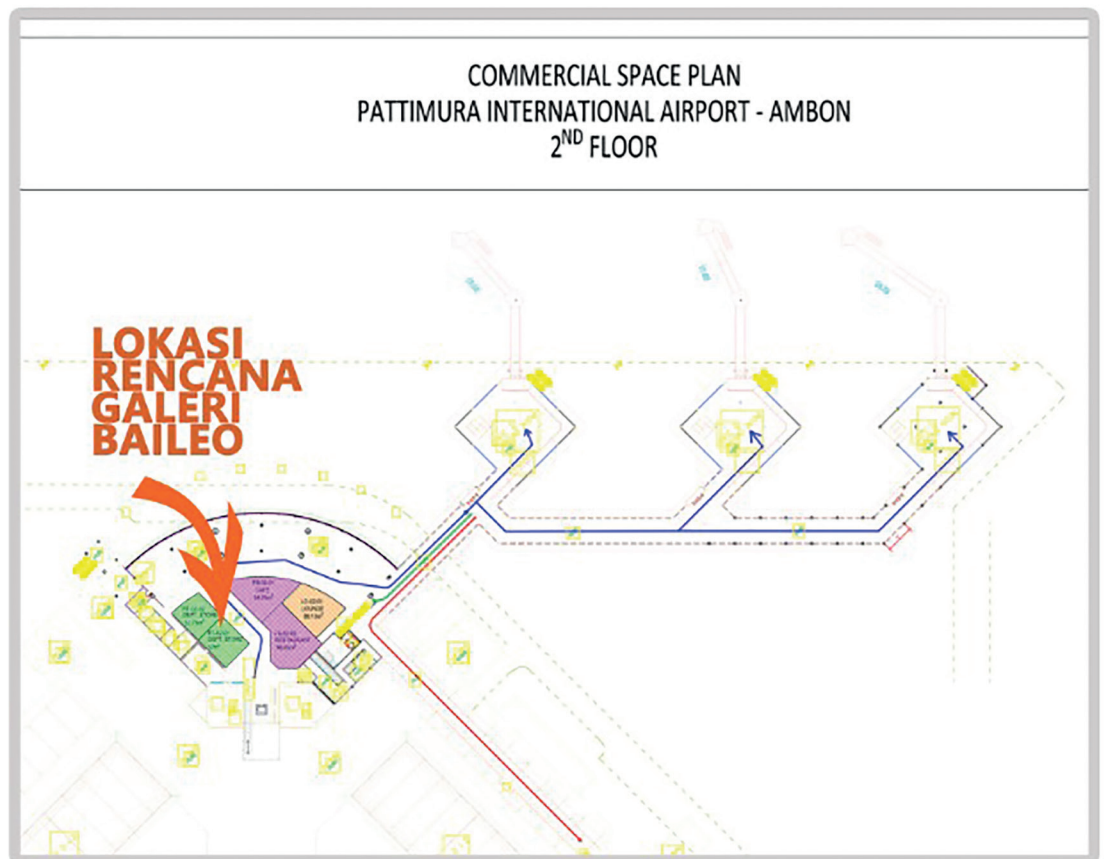
AREA DARI DEPAN LIFT DAN ESCALATOR SERTA SUDUT DISPLAY PETA MALUKU
BESERTA INFORMASI BANK MALUKU MALUT

**TAMPAK DEPAN GALERI BAILEO UMKM MALUKU
DI LANTAI 2 BANDARA PATTIMURA AMBON**



**AREA KIRI DEPAN, UNTUK DISPLAY ANEKA TENUN DAN KAIN (WASTRA),
KERAJINAN, FASHION SERTA ASESORIS**

RENCANA LOKASI GERAJ BAILEO UMKM MALUKU
Lantai 2 Bandara Pattimura



Investasi Batutua Tembaga Raya di Maluku

Investasi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan investor dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi di masa depan. Dengan investasi di suatu daerah, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar seperti penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Maluku memiliki kekayaan yang melimpah di sektor pertambangan. Hal ini membuat perusahaan besar seperti Batutua Kharisma Permai dan Batutua Tembaga raya (BKP-BTR) memutuskan untuk berinvestasi

di Maluku. Penjelasan tentang sejarah berdiri perusahaan, perkembangannya, serta dampak investasi yang perusahaan berikan bagi masyarakat sekitar, dapat dilihat dalam wawancara yang kami lakukan bersama Bapak Boyke P. Abidin, Direktur BKP-BTR.

Bagaimana sejarah berdirinya BKP-BTR?

Sejarah Batutua Kharisma Permai dan Batutua Tembaga Raya (BKP-BTR) berawal dari berakhirnya operasi penambangan emas oleh Prima Lirang Mining (PLM) di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada 1990-an. Finders Resources, perusahaan

pertambangan asal Australia, menemukan cadangan tembaga di bawah dan sekitar area bekas PLM.

Pada 2005, Finders bersama mitra lokal dan entitasnya yang bernama BKP-BTR memperoleh izin eksplorasi dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Maluku Barat Daya).

Pada 2008, BKP-BTR kemudian membangun sarana pengolahan mineral tembaga (plant) dan melakukan pengujian (commissioning). Plant tersebut memiliki kapasitas 3.000 ton (3KT).

Kemudian, pada 2013, BKP-BTR meningkatkan fungsi plant menjadi sarana produksi tembaga yang bernilai komersial. Namun, ketika itu





plant tersebut belum dijalankan hingga maksimal. Plant tersebut baru beroperasi secara maksimal tiga tahun kemudian. Pada 2015, BKP-BTR membangun dan menguji satu plant lagi dengan kapasitas jauh lebih besar, yaitu 25.000 ton (25 KT). Pada 2016, kedua plant tersebut telah mampu berjalan secara maksimal.

Pada 2018, BKP-BTR diakuisisi PT Merdeka Copper Gold Tbk (MCG), perusahaan tambang yang kepemilikan dan penguasaan sahamnya sepenuhnya dimiliki lembaga dan publik Indonesia yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia. MCG mengakuisisi BKP-BTR melalui penguasaan saham Eastern Field Developments Limited (EFDL) yang memiliki saham mayoritas pada Finders Resource yang mengendalikan BKP-BTR. Sejak proses akuisi tersebut, BKP-BTR kemudian menjadi anak perusahaan (subsidiary) MCG. Pada Maret 2018, BKP-BTR membuka area tambang dan kemudian melakukan penambangan di area Lerokis pada Maret 2019, dan area Partolang pada Oktober 2020.

Mengapa tertarik untuk berinvestasi di Maluku?

BKP-BTR tertarik untuk berinvestasi di Maluku karena kekayaan sumber daya mineral di Maluku begitu besar, dan belum banyak pihak yang menambang dan mengolah sumber daya mineral

tersebut sehingga terbuka peluang besar untuk berinventasi di Maluku. Selain itu, Pemerintah Maluku senantiasa mengelola iklim usaha yang menarik, menjamin keamanan, dan memberikan dukungan berupa layanan perizinan dan administrasi yang baik.

Bagaimana proses pengurusan izin saat memulai usaha?

BKP memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati Maluku Tenggara Barat pada 2005. Dengan adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 sehubungan dengan status kepemilikan saham asing (PMA) maka IUP dialihkan ke Pusat. Pada 2018, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan surat IUP Nomor 7/1/IUP/PMA Tahun 2018 kepada BKP.

Berdasarkan IUP yang dimiliki, BKP melakukan eksplorasi untuk mengetahui cadangan mineral tembaga yang ada. Kegiatan eksplorasi ini memerlukan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Setelah eksplorasi selesai, dilakukan kajian studi kelayakan untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta kajian analisa dampak lingkungan untuk mendapat persetujuan dari Gubernur Maluku untuk melakukan kegiatan eksploitasi penambangan.

Selain itu, untuk kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi yang berada di area hutan diperlukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara itu, BTR memiliki izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian (IUPOP) dari Bupati Maluku Tenggara Barat pada 2011. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait status kepemilikan modal asing (PMA), maka IUOPK BTR dialihkan ke Pusat.

Pada 2015, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam Tembaga dengan surat keputusan Nomor 1/1/IUP/PMA Tahun 2015 kepada BTR. Izin tersebut meliputi kegiatan membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan, termasuk menjual komoditas tambang mineral hasil olahannya.

Berdasarkan surat izin tersebut dilakukan kajian studi kelayakan untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta kajian analisa dampak lingkungan untuk mendapat persetujuan dari Gubernur Maluku terkait pengolahan dan Pemurnian Logam Tembaga.

Bagaimana perkembangan bisnis BKP-BTR sejak awal hingga kini?

Tingkat produksi tembaga oleh BKP-BTR dari 2016 hingga 2021 sangat fluktuatif, dengan jumlah produksi terbesar terjadi pada 2017 yaitu sebanyak 23.000 ton. Pada 2020, produksi BKP-BTR berada di tingkat paling rendah karena bijih tembaga dari area Lerokis tidak dapat di-leaching, sehingga tidak menghasilkan tembaga. Dengan mulai ditambangnya area Partolang pada Oktober 2020, produksi tembaga BKP-BTR diperkirakan bisa mencapai 18.500 ton tembaga. Tingkat produksi diperkirakan akan terus meningkat dengan beroperasinya Instalasi Pengelolaan Air (Water Treatment Plant).

Sebagian besar—atau 90 persen—tembaga produksi BKP-BTR diekspor ke luar negeri dengan tujuan negara utama adalah China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Korea Selatan. Sementara sisa 10% tembaga dipasarkan di dalam negeri, yaitu pada Karya Sumiden Indonesia yang berlokasi di Tangerang, Provinsi Banten.

Apa saja kegiatan sosial (CSR) yang telah dilakukan untuk masyarakat sekitar?

Salah satu prinsip usaha pertambangan yang baik adalah apabila kehadirannya memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar area operasinya, yang biasa disebut masyarakat lingkaran tambang. BKP-BTR menjalankan rangkaian kegiatan kepada masyarakat lingkaran tambang di Desa Uhak dan Desa Lurang sesuai dengan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) 2019–2023 yang disetujui oleh Kementerian ESDM, dan program di luar PPM yang tetap terkait dengan manfaat kehadiran BKP-BTR bagi masyarakat lingkaran tambang.

PPM maupun manfaat lain bagi masyarakat lingkaran tambang dari BKP-BTR terdiri atas tujuh bidang program, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Peningkatan Pendapatan Riil Masyarakat, Kemandirian Ekonomi, Sosial Budaya, Kelembagaan Komunitas Penunjang Kemandirian PPM, dan Pembangunan Infrastruktur yang menunjang PPM.

Bidang Pendidikan meliputi (a) beasiswa penuh dan beasiswa

bantuan per semester bagi pelajar SMP, SMA, dan Mahasiswa; (b) honor dan insentif bagi guru kontrak, (c) pelatihan bagi guru-guru, dan (d) sarana dua asrama mahasiswa di Kupang dan 2 ruang belajar untuk SMA Lurang; (d) bantuan buku-buku pelajaran untuk SD, SMP, dan SMA.

Bidang Kesehatan meliputi (a) pemberian pengobatan gratis di klinik milik Perusahaan, (b) pengobatan gratis melalui kunjungan dokter dan paramedik ke permukiman warga Uhak dan Lurang, termasuk evakuasi pasien dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis dari rumah sakit di Atambua; (c) penyediaan obat-obatan melalui Puskesmas Lurang, (d) lomba lingkungan sehat dan Promosi Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), (e) dukungan terhadap akreditasi Puskesmas Lurang; (f) pengadaan Alkes untuk Puskesmas Lurang; (g) mendukung Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan Wetar Utara melalui bantuan logistik, obat-obatan, Swab Antigen, dan vaksin Sinopharm.

Bidang Peningkatan Pendapatan Riil Masyarakat meliputi (a) membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat sebagai penyedia pasokan komoditas lokal (local supply) untuk Perusahaan: daging ayam, telur, ikan, sayur-mayur, buah-buahan, kerupuk dan tahu-tempe, dan (b) penyediaan fasilitas angkutan gratis untuk barang-barang dagangan maupun pribadi masyarakat (community cargo) dari Kupang dan Atambua ke Wetar dengan menggunakan kapal Perusahaan.

Bidang Kemandirian Ekonomi meliputi (a) pelatihan pengolahan dan pengelolaan usaha madu hutan, dan (b) program pengembangan dan pengolahan jambu mete.

Bidang Sosial Budaya meliputi (a) pembangunan Gereja Rehoboth di Desa Uhak, (b) pembangunan pagar gedung Gereja Imanuel di Desa Lurang, (c) Rumah Adat, (d) santunan biaya hidup bagi lansia, dan (e) pembayaran kompensasi lahan.

Bidang Kelembagaan Masyarakat meliputi (a) pendampingan terhadap Yayasan Ama Kefe di Desa Uhak dan Yayasan Ina Rifa di Desa Lurang, (b) bantuan dana PPM senilai Rp300 juta per desa bagi Desa Uhak dan Desa Lurang untuk membiayai program yang tidak/belum didanai oleh APBDes, APBD, APBN, atau sumber

dana lainnya, dan (c) dukungan bagi pengembangan BUMDES.

Bidang Infrastruktur meliputi (a) sarana air bersih dan sarana air perpipaan ke kebun masyarakat, (b) sarana listrik ke rumah-rumah, dan (c) pembangunan tempat pembuangan akhir sampah di Desa Lurang.

Manfaat lain BKP-BTR terhadap masyarakat lingkaran tambang adalah rekrutmen tenaga kerja. Hingga akhir November 2021, karyawan BKP-BTR berjumlah 1.084 orang, dengan 54 persen di antaranya merupakan karyawan lokal yang berasal dari Kabupaten Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku.

Proses rekrutmen bermula dari lowongan kerja yang tersedia dari BKP-BTR atau kontraktor mitra yang diberitahukan kepada Pemerintah Desa Uhak dan Desa Lurang. BKP-BTR hanya memproses calon karyawan yang telah mendapat surat rekomendasi resmi dari Kepala Desa Uhak atau Kepala Desa Lurang, dan diketahui oleh Camat Wetar Utara. Prinsip rekrutmen adalah mendahulukan warga asli Uhak dan Lurang, lalu kerabat dekatnya, kemudian warga Maluku Barat Daya dan Maluku. Keterlibatan kepala desa dan camat dalam proses rekrutmen juga berguna untuk memastikan bahwa calon tenaga kerja merupakan warga Uhak, Lurang, Maluku Barat Daya atau Maluku.

Rekrutmen yang dilaksanakan BKP-BTR serta kontraktor mutlak mensyaratkan kesehatan dan kebugaran tenaga kerja yang dibuktikan dengan uji kesehatan (medical check up) yang dilakukan oleh institusi/lembaga profesional. Kesehatan dan kebugaran tenaga kerja menjadi syarat penting karena lingkungan kerja pertambangan mengandung potensi risiko tinggi yang memerlukan kehati-hatian yang saksama.

BKP-BTR menjalankan komitmen mengembangkan atau meningkatkan kapasitas karyawan lokal melalui tiga jalur, yaitu (1) Fresh Graduate Mining Program yang ditujukan bagi sarjana baru dan mereka yang belum pernah bekerja, (2) mengirimkan karyawan lokal ke pusat pelatihan di luar Perusahaan seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) milik Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) di Bandung, Jawa Barat, serta (3) alih pengetahuan dan

pengalaman di lingkungan pekerjaan.

Hingga akhir November 2021, telah ada 66 karyawan lokal yang masuk dan duduk dalam jajaran staf yang menjalankan tugas dan memimpin suatu tim.

Selain rangkaian pengembangan dan peningkatan kapasitas khusus bagi karyawan lokal, program-program pelatihan sumber daya manusia juga dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dimulai dari saat karyawan diterima bekerja.

Pernakah BKP-BTR menjalin kerja sama strategis dengan UMKM?

BKP-BTR menyediakan makan tiga kali sehari bagi ratusan karyawan di Wetar. Sebagian bahan pangan memang didatangkan dari luar, namun cukup banyak yang berasal dari masyarakat lingkaran tangkai. Mereka memasok berbagai bahan pangan, antara lain sayur-mayur dan buah-buahan, daging dan telur ayam, ikan segar, tahu-tempe hingga krupuk. Mereka adalah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan BKP-BTR melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Salah satu Program PPM adalah mendampingi dan membina kelompok petani untuk menanam sayur-mayur dan buah-buahan; kelompok peternak untuk beternak ayam pedaging dan ayam petelur; serta kelompok nelayan

untuk menangkap ikan. Ketiga kelompok tersebut bernaung di bawah dua yayasan, yaitu Yayasan Ama Kefe di Uhak dan Yayasan Ina Rifa di Lurang. Hasil usaha ketiga kelompok ini dipasok kepada katering perusahaan BKP-BTR (Prasmanindo Boga Utama/PBU), di mana secara kumulatif dalam setahun ketiga kelompok ini bisa menghasilkan pendapatan sekitar 4 miliar rupiah.

Selain itu, BKP-BTR mengembangkan kegiatan ekonomi yang direncanakan berkelanjutan, yaitu produksi madu hutan. Sejak dulu, madu hutan sudah menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat di Wetar. BKP-BTR melatih para pencari madu hutan sehingga mereka dapat memanen madu dengan baik, bersih, dan higienis; dapat mengolah madu (melalui penirisan dan penyaringan), dan mampu menurunkan kadar air sesuai dengan batasan SNI. BKP-BTR juga sedang melakukan survei akses pasar bagi produk madu Wetar tersebut. Diharapkan, produk kemasan madu hutan tersebut menjadi ikon Pulau Wetar di masa depan. Sekain produksi madu hutan, kegiatan ekonomi lain yang sedang disiapkan BKP-BTR adalah pengembangan produk jambu mete.

Selain itu, perusahaan juga mengalokasikan kontainer khusus untuk menampung dan mengangkut kargo masyarakat dari Kupang ke Wetar, dengan frekuensi tiga sampai empat kali dalam

satu bulan. Kargo masyarakat kebanyakan berupa bahan-bahan dagangan kios, seperti sembako maupun bahan-bahan bangunan, serta bahan-bahan konsumsi rumah tangga lainnya.

Bagaimana rencana pengembangan usaha BKP-BTR ke depan?

Ke depan, Grup Merdeka berencana untuk mengembangkan inovasi lebih lanjut terhadap BKP-BTR yang sejauh ini melakukan penambangan dan produksi tembaga. Selama ini BKP berproduksi menggunakan metode penambangan terbuka atau open pit dan metode pelindian atau heapleach untuk mengekstrak kandungan tembaga. Tembaga yang sudah diekstrak itulah yang kemudian dibawa ke BTR untuk diolah menjadi lempengan tembaga. Namun, ternyata tidak semua kandungan mineral bisa diekstrak di pelindian tersebut. Masih banyak batuan halus atau ore yang tertumpuk di pelindian, yang masih mengandung mineral bernilai ekonomi, salah satunya pirit—bahan baku baterai. Untuk itu diperlukan satu tempat baru yang mampu mengekstrak tumpukan ore di pelindian itu, termasuk konsumen yang akan membelinya.

Untuk itu PT Merdeka Copper Gold Tbk menggandeng Eternal Tsingshan Group Limited dan mendirikan PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI) untuk menjalankan dan mengoperasikan Proyek





Acid, Iron, Metal (AIM), dengan komposisi saham 80 persen dimiliki Merdeka dan 20 persen dimiliki Tsingshan. MTI, sebagai perusahaan yang akan mengoperasikan proyek tersebut, akan didirikan di kompleks industri di Morowali, yang terdiri atas berbagai pabrik yang akan menjadi konsumen dari sebagian besar kandungan mineral yang diekstrak. Dengan begitu, kehadiran MTI akan menambah rantai produksi BKP-BTR. BKP terus menambang tembaga dan BTR terus memprosesnya menjadi lempengan tembaga, sementara MTI akan mengangkut sisa ore dari pelindian di BKP untuk diproses dan hasilnya akan dijual ke pabrik-pabrik yang masih berada dalam satu kompleks dengan MTI.

Proyek AIM akan meningkatkan produksi BKP-BTR dan memperpanjang umur tambang serta keberadaan perusahaan di Wetar. Selain itu, BKP masih terus melakukan proses eksplorasi di lokasi lain yang masih di dalam area perizinannya yang memiliki potensi produksi. Lokasi yang sudah dapat diharapkan menghasilkan tembaga adalah area Partolang Barat.

Bagaimana pendapat BKP-BTR terhadap kondisi investasi di Maluku

sekarang?

Maluku memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam dan perikanan. Sementara itu, pemerintah Maluku segera memulai pembangunan Pelabuhan Baru Ambon dan dengan kekayaan lautnya telah mencanangkan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Hal-hal tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. Apalagi Pemerintah Maluku sejalan dengan Pemerintah Pusat yang terus menyederhanakan proses perizinan bagi investor. Dan, yang tak kalah penting, kondisi Maluku sangatlah aman dan terkendali.

Apakah BKP-BTR akan merekomendasikan Maluku sebagai lokasi investasi kepada perusahaan lain?

BKP-BTR sangat merekomendasikan Maluku sebagai lokasi investasi, mengingat potensi kekayaan mineral dan hasil buminya yang berlimpah. Selain itu, investasi di Maluku juga dapat dilakukan pada pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, khususnya transportasi laut. Provinsi Maluku yang terdiri atas rangkaian pulau besar dan pulau kecil masih membutuhkan transportasi laut yang lebih memadai.

WAWANCARA

“MALUKU HARUS MENJADI SURGA BUAT INVESTOR”

-Bagaimana kondisi investasi di Maluku?

Kita bercita-cita untuk menjadikan Maluku sebagai surga bagi para investor. Kenapa? Dengan diterbitkannya UU no 11 tentang Cipta Kerja, kemudian turunannya sekitar 46 PP dan 4 Peraturan Presiden, secara garis besar itu dimensi yang paling kuat adalah bagaimana proses perizinan itu mudah, transparan, terintegrasi, murah, cepat, dan legal. Itu satu poin yang harus kita ambil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan adanya UU cipta kerja dan turunannya tersebut, kita di daerah Maluku harus bersaing dengan 33 provinsi, yaitu harus membuat sebuah kebijakan insentif buat para investor. Itulah yang harus kita kejar kedepannya.

-Kebijakan insentif tersebut teknisnya seperti apa?

Sebagai contoh, 700 hektar lahan untuk industri pengolahan ikan di Kawasan New Port. Harus ada kebijakan, jangan sampai investor datang lalu harus menyewa lahan tersebut. Jadi diberikan insentif bagi para investor, lahannya free untuk digunakan dalam jangka waktu berapa lama.

Contoh berikutnya adalah kendala atau kurangnya minat investor.

Kenapa investor lebih tertarik untuk berinvestasi di pulau Jawa daripada di luar pulau Jawa? Karena infrastrukturnya di pulau Jawa lengkap. Misalnya akses transportasi baik darat, laut, maupun udara. Kemudian tenaga kerja murah, pengurusan ijin lokasi tanah tidak berbelit-belit, karena dekat dengan sentra-sentra produksi. Di sisi lain Maluku yang merupakan wilayah kepulauan ada tambahan biaya produksi. Contohnya seorang investor mau berinvestasi di pulau Seram, dia mendarat dengan pesawat di Ambon lalu menginap 1 hari dulu di Ambon, besoknya baru dia ke lokasi melalui jalur darat, lalu lanjut naik speedboat, baru sampai ke lokasi. Hal tersebut tentunya memakan waktu dan biaya.

Oleh karena itu, jika biaya yang dikeluarkan investor tinggi kita harus membantu investor tersebut dengan proses perizinan yang mudah, tenaga kerja murah, keamanan terjamin supaya seimbang.

-Apa langkah strategis DPMPTSP Maluku dalam meningkatkan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing? Apakah

menurut Bapak sudah efektif?

Langkah strategis yang kita lakukan agar dapat menarik minat investor ada 2. Pertama kita harus mengemas potensi dan peluang investasi dengan baik dan sesederhana mungkin sehingga dapat dicerna oleh para calon investor. Potensi dan peluang investasi di Maluku terbagi atas 4 sektor unggulan, yakni perikanan, pertambangan, perkebunan, serta pariwisata. Kedua, kita harus menyiapkan feasibility study yang sederhana dan mudah dipahami oleh para investor pada setiap gugus pulau untuk keempat sektor unggulan tersebut. Yang ketiga adalah kita harus membuat kebijakan tentang pemberian insentif kepada para investor. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Maluku merupakan wilayah kepulauan yang sulit diakses ke lokasi proyek.

-Bagaimana cara DPMPTSP Maluku mengemas 4 sektor unggulan tersebut sehingga dapat menarik minat investor?





Di era digital seperti sekarang ini kita harus mengemasnya seperti di website, disamping itu kita juga di tempat-tempat dan negara-negara yang kita anggap strategis untuk diadakan pameran, dan kita juga bekerjasama dengan DPMPTSP provinsi se-Indonesia. Investasi yang kita inginkan adalah investasi yang berkelanjutan dan berkolaborasi dengan provinsi-provinsi di Indonesia. Satu contoh di sektor pariwisata, kalau misalnya ada paket pariwisata 10 hari di Bali, 7 hari turis berlibur di Bali, lalu 3 hari sisanya diarahkan ke Maluku. Kerjasama selain dalam paket paket pariwisata, bisa juga dalam paket perdagangan, kerjasam pabrik industry. Contohnya provinsi kita kekurangan nikel, tetapi provinsi sekitar kaya akan nikel. Maka ada peluang investasi smelter, dimana bahan nikel mentah dibawa untuk diolah di provinsi Maluku, kemudian dengan adanya new port maka nikel yang sudah diolah tersebut dapat langsung diekspor.

-Selama ini faktor apa saja yang Bapak rasa menjadi penghambat investasi di Maluku?

Pertama adalah faktor regulasi, tumpang tindihnya Perda. Ada Perda yang mengatur tentang suatu wilayah darat diperuntukan menjadi wilayah perkebunan, sedangkan Perda lainnya mengatur tentang wilayah pesisir pantai daerah tersebut diperuntukan untuk pariwisata. Hal ini mengakibatkan investor di bidang perkebunan tidak

diberikan ijin membangun jeti, karena wilayah pesisir pantai tersebut tidak diperuntukan untuk industry, melainkan sektor pariwisata.

Kedua adalah masalah proses perizinan. Dalam mengurus izin usaha, persyaratannya terlalu banyak. Contohnya pelaku usaha yang mengurus izin di sektor perkebunan harus ada Amdal, harus pembebasan kawasan, harus ada persetujuan dari kepala desa, Camat, Bupati, Gubernur, sampai pusat. Hal itu membuat pelaku usaha kalang kabut dalam mengurus izin usahanya. Selama ini seperti itu, namun diharapkan dengan aplikasi OSS masalah ini dapat terselesaikan.

Ketiga adalah masih adanya ego sektor baik di anatar provinsi dalam suatu wilayah, maupun antar kewenangan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat.

Keempat adalah para pemangku kepentingan masih belum memahami bahwa investasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mensejahterakan masyarakat.

-Bagaimana kinerja DPMPTSP Maluku dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat?

Soal kinerja pelayanan publik, kita dievaluasi oleh 4 instansi yakni Ombudsman, KPK, MenpanRB, dan Kementerian Investasi/BKPM. Maluku menerima penghargaan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelayanan Berusaha

dengan kriteria inovasi Sangat Baik tahun 2021. Hal ini terlampir dalam keputusan Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 139 Tahun 2021.

-Bagaimana strategi DPMPTSP Maluku dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang optimal, efektif, dan efisien?

Peningkatan SDM aparatur yang dilakukan melalui sosialisasi dan bimtek, baik di provinsi maupun di 11 kabupaten/kota. Lalu juga peningkatan SDM pelaku usaha, sosialisasi dan bimtek juga. Selain itu dibuat inovasi berupa Klinik OSS yang menjadi media bagi pelaku usaha dalam berkonsultasi jika terdapat kendala dalam mengurus izin usaha.

-Bagaimana kelengkapan sarana prasarana penunjang pelayanan publik dalam proses perizinan di DPMPTSP Maluku?

Dari aspek sarana prasarana, memang belum memenuhi kepuasan dari para pelaku usaha yang datang mengurus izin usaha. Kedua, masih terbatasnya Sarana Promosi dalam bentuk media majalah dan digital yang mempermudah pelaku usaha dalam melengkapi persyaratan perizinan. Misalnya pelaku usaha mau melunasi biaya retribusi, sementara sarana dari perbankan belum melayani disetiap wilayah Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait.

NEWS

DPMPTSP Maluku Ramaikan Pameran Invesda Expo 2021 di Surabaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku turut mengikuti kegiatan pameran Invesda Expo 2021 di Surabaya tanggal 7 hingga 10 Oktober 2021, berlokasi di Grand City Mall Surabaya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan peluang investasi dan produk-produk unggulan yang dimiliki pemerintah daerah serta perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia.

Agenda acara yang dilaksanakan adalah pameran produk-produk unggulan, pameran peluang investasi, talkshow, presentasi/demo produk, peluang bisnis dan investasi, serta



hiburan dengan menghadirkan pentas seni dan budaya Nusantara dan Live Music Performance.

Adapun Kegiatan Invesda Expo 2021 diselenggarakan bersamaan dengan Pameran Gebyar UMKM, Koperasi, PKBL, Pameran Pesona Wisata Nusantara, dan Pameran Pangan Nusantara.

Di pameran itu, DPMPTSP Provinsi Maluku menampilkan Informasi potensi investasi yang terdiri dari 4 (empat) sektor unggulan yakni Sektor Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, dan Pertambangan berupa informasi melalui leaflet, booklet dan DVD Potensi investasi, serta menayangkan Video Potensi dari 4 (empat) sektor tersebut.



Selain itu, DPMPTSP Provinsi Maluku juga menampilkan produk khas yang berasal dari Maluku seperti Minyak Kayu Putih, Minyak Cengkeh, dan Aneka Makanan Kering khas Maluku.

Antusias pengunjung sangat tinggi berasal dari kalangan pengusaha yang menanyakan informasi tentang potensi investasi apa saja yang bisa menjadi peluang usaha bagi mereka yang ingin





berinvestasi di Maluku, serta apa saja syarat-syarat yang harus mereka penuhi untuk memiliki izin usaha tersebut.

Sebagian pengunjung stand yang lain, tertarik akan produk-produk khas Maluku yang ditampilkan dan tertarik untuk bekerjasama dalam mendatangkan produk tersebut dan memasarkannya di daerah mereka. Tentu ini sangat membantu pengembangan usaha dari para UMKM yang menghasilkan produk khas Maluku sehingga pemasarannya bisa menjangkau lebih banyak lagi daerah lain di Indonesia.

Pameran ini dibuka oleh Ketua Dekopin Indonesia, Dr. Sri

Untari Bisowarno, M.Ap, sekaligus menyempatkan diri berkunjung ke Stand Pameran DPMPTSP Provinsi Maluku, dan diterima langsung oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku, Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si sekaligus menyerahkan cinderamata.

Kegiatan ini terbilang sukses diselenggarakan di tengah pemulihan dari situasi pandemi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, sehingga diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus diselenggarakan untuk membangkitkan kembali geliat investasi yang sempat terpuruk disebabkan wabah virus Covid-19 yang melanda seluruh daerah di Indonesia. (*)



DPMPTSP MALUKU IKUT IIWF 2021

Indonesia Investment Webinar Forum (IIWF) 2021 adalah forum bisnis virtual yang mengangkat tema “Sustainable Investment on Fisheries and Logistic”. Forum yang diselenggarakan Kementerian Investasi/BKPM itu terdiri dari sesi remarks dari pemerintah pusat dan daerah, diskusi panel dari para pelaku usaha, serta one-on-one meeting.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin, mewakili Gubernur Maluku sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut. Untuk mendukung Program Lumbung Ikan Nasional (LIN), Pemerintah Provinsi Maluku menawarkan peluang investasi bagi para investor domestik dan asing.

Dari potensi perikanan yang bisa diambil 3,73 juta ton, sedangkan yang baru tergarap hanya 14,45 persen. Suryadi menjelaskan, Maluku memiliki banyak sumber daya yang bisa dikembangkan oleh investor. Dengan adanya investasi ini diharapkan bisa memajukan industri perikanan di Maluku.



Peluang investasi yang ditawarkan antara lain kebutuhan tambahan armada tangkap. Saat ini Pemprov Maluku sendiri tengah mendorong untuk wilayah pengelolaan perikanan di kawasan 715 dan kawasan 718.

“Kita tawarkan adalah untuk kapal tangkap yang 100 GT kita butuh tambahannya 1.028 unit. Kemudian untuk 300 GT kita butuh sekitar 457 unit,” kata dia dalam acara IIWF 2021, Rabu 8

September 2021.

Pemprov Maluku juga menawarkan investasi di kapal ekspor untuk keperluan pelabuhan baru. Adapun kebutuhan kapal ekspor mencapai 30 unit dengan kapasitas 5.000 GT.

“Jadi pelabuhan akan eksis nantinya kalau 5.000 GT kapal dengan 30 unit ini juga akan mendorong bagaimana kawasan industri itu menyiapkan 5.000 ton tiap kapal dikalikan dengan 30 unit itu,” kata dia. (*)

Maluku Harus Jadi Surga Bagi Investor

Dengan diterbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku, Dr. Ir. Suryadi Sabirin, M.Si, memastikan akan menjadikan Maluku sebagai surganya para investor

Suryadi mengatakan, secara garis besar, aturan tersebut mendorong proses perizinan yang jauh lebih mudah, transparan, terintegrasi, murah, cepat, dan legal. Artinya, UU Cipta Kerja dan turunannya, sangat mendorong Maluku untuk harus lebih bersaing lagi dengan 33 provinsi lain di Indonesia.

Guna menjadikan Maluku sebagai surganya para investor, pihaknya akan meluncurkan sejumlah kebijakan insentif, seperti menyediakan lahan seluas 700 hektar untuk industri pengolahan ikan di kawasan Ambon New Port agar ketika investor menyewa lahan dapat diberikan insentif, yakni dengan pemanfaatan lahan dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu kendala kurangnya minat investor berinvestasi di Maluku, kata dia karena infrastruktur di Pulau Jawa jauh lebih lengkap seperti akses transportasi, baik darat, laut, maupun udara, power plant (listrik), termasuk

tenaga kerja yang murah, pengurusan ijin lokasi tanah yang tidak berbelit-belit, serta dekat dengan sentra-sentra produksi.

“Sedangkan Maluku yang merupakan wilayah kepulauan, membutuhkan tambahan biaya produksi. Kita ambil contoh seorang investor mau berinvestasi di Pulau Seram, dia mendarat dengan pesawat di Ambon, lalu menginap 1 hari dulu di Ambon, besoknya baru ke lokasi melalui jalur darat, lalu lanjut naik speedboat, baru bisa sampai ke lokasi. Hal tersebut tentu memakan waktu dan biaya,” jelasnya.

Untuk memudahkan hal ini, kata dia, maka DPMPTSP Maluku harus membantu investor dengan proses perizinan yang mudah, tenaga kerja murah, keamanan terjamin, sehingga keseimbangan pun tercipta.

Selain itu, untuk menarik masuknya investor PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) ke Maluku, maka pihaknya akan mengemas potensi dan peluang investasi dengan baik dan sesederhana mungkin, sehingga dapat dipahami oleh para calon investor.

“Potensi dan peluang investasi di Maluku, terbagi atas empat sektor unggulan, yakni

perikanan, pertambangan, perkebunan, serta pariwisata. Kita harus menyiapkan feasibility studi (studi kelayakan) yang sederhana dan mudah dipahami para investor di setiap gugus pulau, untuk keempat sektor unggulan ini, serta perlu ada pemberian insentif kepada para investor,” jelasnya.

Terhadap empat sektor unggulan tersebut, maka di era digital saat ini, pihaknya juga akan mengemas melalui website dan akan disampaikan informasi potensi dan peluang investasi Maluku melalui pameran di beberapa negara yang dianggap strategis, dan bekerjasama dengan DPMPTSP tingkat provinsi se-Indonesia, sehingga tercipta investasi yang berkelanjutan, melalui kolaborasi dengan provinsi lain di Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik, maka DPMPTSP membuka diri untuk dievaluasi oleh Ombudsman, KPK, Menpan RB, dan Kementerian Investasi/BKPM, walaupun dari aspek sarana-prasarana belum memenuhi kepuasan dari para pelaku usaha yang datang mengurus izin usaha, serta masih terbatasnya sarana promosi dalam bentuk media majalah dan digital, yang mempermudah pelaku usaha dalam melengkapi persyaratan perizinan. (*)

DPMPTSP Maluku Gandeng TGPP dan HIPMI



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Maluku menggandeng Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku menggelar sosialisasi sistem Online Single Submission (OSS) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertempat di Ballroom Hotel The Natsepa Ambon.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 8 hingga 9 Desember 2021 itu, pada hari pertama dihadiri sekurangnya 75 pelaku usaha mikro dan kecil di daerah ini. Sementara pada hari kedua, segmen peserta yang disasar adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang fokusnya nanti pada bimbingan teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

"Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi para pelaku usaha, terkhususnya para pelaku UMKM, juga memberi manfaat yang nyata dalam pengembangan iklim penanaman modal dan pertumbuhan kinerja investasi di Provinsi Maluku," kata Plh. Sekretaris Daerah Maluku Sadli Ie mewakili Gubernur Maluku saat membuka acara, Rabu 8 Desember 2021.

Kadis PM-PTSP Maluku, Syuryadi Sabirin mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan itu bertujuan untuk memberikan pemahaman para pelaku usaha maupun stakeholder terkait lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem OSS Berbasis Risiko.

"Di kegiatan ini juga kami langsung memfasilitasi para pelaku usaha untuk langsung membuat NIB (Nomor Induk

Berusaha) secara cepat dan gratis, termasuk memberikan informasi penting lainnya seperti pengurusan ISO, Lebel Halal bagi produk makanan, serta sertifikasi produk lainnya yang dibutuhkan para pelaku usaha," jelasnya.

Dikatakannya, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha.

Pada hari pertama kegiatan ini, hadir sebagai narasumber adalah Ketua TGPP Maluku Hadi Basalamah, Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Azis Tunny, dan Kepala DPMPTSP Maluku Syuryadi Sabirin.

Azis Tunny yang membawakan materi legalitas perizinan berusaha bagi para pelaku usaha mengatakan, selama ini orang selalu beranggapan bahwa akses modal dan akses pasar adalah dua hal kunci yang menentukan bisa tidaknya suatu bisnis atau usaha memperbesar skala usahanya.

"Aspek legalitas juga sangat penting, sebab sampai dengan batas besaran kebutuhan modal atau transaksi penjualan tertentu, baik calon pemberi modal yakni kreditur atau investor maupun calon offtaker (pembeli besar), akan meminta dokumen-dokumen legalitas usaha," jelasnya.

Karena itu, lanjut Azis, kegiatan desiminasi informasi terkait penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan oleh DPM-PTSP Maluku ini menjadi sangat penting sekali.

"Kegiatan ini sangat membantu para pelaku usaha mikro dan kecil di Maluku, khususnya bagaimana akses mereka memperoleh izin dan sertifikasi produk. Dalam diskusi tadi juga dibahas banyak persoalan mendasar, mulai dari packaging, branding hingga marketing. Kedepan, kami akan mendorong hadirnya rumah kemasan hingga rumah produksi sehingga dapat menjawab problematika para pelaku usaha mikro dan kecil di daerah ini," tandasnya. (*)

Kepala BSN Apresiasi DPMPTSP Maluku

Dalam rangka mendorong suksesnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Maluku, Pemerintah telah memberikan kemudahan perizinan berusaha melalui online single submission (OSS). Dalam perizinan tersebut, pelaku UMKM, akan mendapatkan ijin penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) secara gratis.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kuku S. Achmad, saat menghadiri pameran UMKM bimbingan Pemerintah Provinsi Maluku, yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku pada Jumat 10 September 2021, turut mengapresiasi dan memberikan dukungannya terhadap DPMPTSP

Maluku yang telah memperhatikan para UMKM.

Ia mengatakan, guna penerapan sistem management mutu dan meminimalisir penyupaan, maka sangat diperlukan sistem management anti penyupaan. Untuk mencapai target tersebut, Kepala BSN berjanji untuk

memfasilitasi DPMPTSP Maluku untuk mewujudkannya.

Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin, menyambut baik hal tersebut. Pihaknya juga tengah mempersiapkan langkah-langkah konkrit untuk mendapatkan standardisasi demi meningkatkan pelayanan yang baik. (*)





Perizinan Berusaha Harus Mudah, Murah, dan Legal

Untuk mendorong minat investor untuk datang dan berinvestasi di daerah, maka penyelenggaraan perizinan juga dituntut berorientasi pada prinsip mudah, murah, dan legal.

Plh sekda Maluku, Sadali Ie, membuka dengan resmi Rapat Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal dan Forum Koordinasi DPMPTSP se-Maluku pada Kamis, 21 Oktober 2021, bertempat di Hotel Manise, Ambon.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku, Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Maluku, serta unsur terkait lainnya.

Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Plh Sekda Maluku, dikatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha harus berorientasi pada prinsip mudah, murah, dan legal, karena dengan demikian akan mendorong minat investor untuk berinvestasi di daerah.

Gubernur dalam sambutannya, mengatakan, investasi merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, karena memberikan kontribusi dan dampak yang besar dalam meningkatkan perekonomian serta penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu, untuk terwujudnya hal tersebut perlu adanya kerja keras, koordinasi, dan kolaborasi

yang intens dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar OPD, dan para pelaku usaha.

Selain itu, dalam rangka memperkuat penyelenggaraan perizinan

maka dalam sambutannya, Gubernur menekankan beberapa hal penting diantaranya meminta setiap DPMPTSP di Maluku untuk selalu melakukan koordinasi dengan OPD teknis. (*)



Bupati Malra Buka Bimtek LKPM & OSS Online



Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat menggelar kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan OSS secara Online. Kegiatan tersebut bertempat di Villia Hotel, Langgur, Rabu 9 Juli 2021.

Bupati Malra, M. Thaher Hanubun, membuka secara resmi yang di tandai dengan pemukulan tifa. Turut mendampingi Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda serta sejumlah pimpinan

OPD.

Bupati Malra mengatakan, pentingnya Bimtek LKPM online dan OSS bagi pelaku usaha. Bimtek yang digelar DPMPTSP itu menurut Hanubun, sangat penting, karena ada banyak pelaku usaha yang lupa dengan password saat melakukan pendataan LKPM online. Ada juga yang belum memahami mekanisme pengisian laporan tersebut.

“Ini terjadi akibat para pelaku usaha belum mendapatkan sosialisasi layanan pelaporan berbasis online itu,” ucap Hanubun saat membuka Bimtek.

Selain itu, ada pelaku usaha juga yang tidak jujur melaporkan nilai investasinya saat pendataan LKPM.

“Untuk itu, Bimtek LKPM online dan OSS ini dilaksanakan guna memberikan sekaligus menyatukan persepsi terkait pelaksanaan kebijakan penanaman modal, serta kemudahan dalam pelaporan realisasi nilai investasi,” terang Hanubun.

Ia berharap, kegiatan Bimtek LKPM online dan OSS itu dapat memberikan nilai tambah, pengetahuan dan kemudahan-kemudahan bagi para pelaku usaha di Malra.

Kepala DPMPTSP Malra, M. Tukloy, selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Bimtek ini guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam melaksanakan pelaporan LKPM sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu juga, meningkatkan kualitas pelayanan dan memfasilitasi serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mengetahui LKPM dan OSS dengan baik.

Tiga narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal, dan Informasi Penanam Modal DPMPTSP Provinsi Maluku Bpk. M. Riduan Hamissy, S.Pi, M.Si, Bpk. Agus sebagai Admin LKPM Online CV. Dua Sisi Kembar, dan Tenaga Pendamping Helpdeks OSS dari PT. Sukofindo, Bpk. Iskandar Slamet.

Peserta yang hadir merupakan pelaku usaha sebanyak 27 orang asal wilayah Malra, dengan latar belakang berbagai bidang usaha. Kegiatan tersebut berlangsung selama satu hari dengan berbagai materi. (*)

Dua Kementerian Bidik Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Maluku

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) bersinergi dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengembangkan investasi berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. Percepatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan ini memerlukan peningkatan investasi dan keberlanjutan usahanya.

“Keberlanjutan usaha diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi perikanan menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan investasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya, Ditjen PDSPKP selalu aktif dalam berbagai forum investasi untuk mempromosikan peluang investasi, sekaligus menarik minat calon investor yang ingin berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Direktur Jenderal PDSPKP, Artati Widiarti, Rabu 15 September 2021.

Dalam salah satu forum investasi yang digelar BKPM pekan lalu pada 8 September 2021 bertajuk Indonesia Investment Webinar Forum (IIWF) 2021, Staf Ahli Menteri Investasi Bidang Ekonomi Makro, Kementerian Investasi/BKPM, Indra Darmawan, menegaskan bahwa kepercayaan dunia untuk berinvestasi di Indonesia masih tetap terjaga.

Terbukti secara kumulatif sepanjang periode Januari–Juni 2021, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp442,7 triliun atau 49,2 % dari target Rp900 triliun pada akhir tahun. “Capaian ini terdiri atas PMA sebesar Rp228,5 triliun dan PMDN sebesar Rp214,2 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 623.715 orang tenaga kerja Indonesia,” tegas Indra.

Senada, Artati juga menyampaikan kinerja realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan periode Januari–Juni 2021 telah mencapai Rp2,97 triliun atau 54,04% dibandingkan dengan target 2021 sebesar Rp5,49 triliun. “Investasi di sektor kelautan dan perikanan masih didominasi investasi dari PMDN sebesar Rp1,16 triliun, sedangkan PMA sebesar Rp0,42 triliun dan kredit investasi sebesar Rp1,39



triliun,” imbuh Artati.

Investasi di sektor kelautan dan perikanan, lanjut Artati, terdapat tiga bidang usaha prioritas yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal atau investasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Melalui Peraturan Presiden ini diarahkan menjadi pengaturan investasi yang lebih berdaya saing.

“Tiga bidang tersebut adalah usaha penangkapan, budidaya, dan pengolahan ikan. Sebagai bidang usaha prioritas investasi, usaha perikanan ini merupakan bidang usaha yang termasuk dalam program/proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, dan berorientasi ekspor. Salah satunya proyek strategis nasional Lumbung Ikan Nasional,” sambung Artati.

Sebagaimana yang disampaikan Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin, peluang investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional diantaranya penambahan armada penangkapan dan kapal ekspor. “Selain itu kita juga sudah menyiapkan lahan untuk budidaya udang, rumput laut dan lainnya di Pulau Seram,” ujar Suryadi saat menyampaikan peluang investasi di acara IIFW 2021.

Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto, sangat mendukung peluang investasi yang ditawarkan Provinsi Maluku.

Terlebih komoditas udang dan rumput laut menjadi fokus dalam modelling pengembangan budidaya terintegrasi. Saat ini udang tengah didorong produksi dan kualitasnya lantaran serapan pasar dunia sangat besar.

Catur menekankan bahwa usaha kelautan dan perikanan merupakan salah satu bidang usaha penanaman modal yang diharapkan berkontribusi positif pada peningkatan ekonomi nasional. “Oleh karenanya Pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, melakukan penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha dan investasi,” tekan Catur.

Untuk menangkap peluang investasi yang ditawarkan, diperlukan kolaborasi dan sinergi bersama dalam membangun sektor kelautan dan investasi melalui investasi yang ditanamkan. “Saya mengajak semua pelaku usaha untuk dapat menanamkan modalnya di sektor kelautan dan perikanan,” pungkas Catur.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan tiga program terobosan KKP, yakni peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, air payau dan air laut berbasis kearifan lokal. (*)

Maluku Tawarkan Investasi di Sektor Perikanan Tangkap

Peluang investasi ditawarkan Provinsi Maluku bagi para investor dalam negeri maupun investor asing. Penawaran ini dilakukan dalam rangka mendukung proyek strategis nasional yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku, Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si, menyampaikan, peluang investasi pertama ditawarkan adalah kebutuhan tambahan armada tangkap.

Saat ini Pemprov Maluku tengah mendorong untuk wilayah pengelolaan perikanan di kawasan 715 dan kawasan 718. Di mana nantinya dua kawasan tersebut butuh kapal-kapal untuk yang eksisting di bawah 30 GT mencapai total 1.876 armada.

"Peluang penambahannya adalah kita tawarkan itu adalah untuk kapal tangkap yang 100 GT kita butuh

tambahannya 1.028 unit. Kemudian untuk 300 GT kita butuh sekitar 457 uni," kata beliau dalam acara Indonesia Investmen Webinar Forum (IIWF), Rabu (8/9).

Tak hanya itu, pihaknya juga menawarkan untuk tambahan kebutuhan kapal ekspor untuk di new port atau pelabuhan baru. Adapun kebutuhan kapal ekspornya mencapai sebanyak 30 unit dengan kapasitas 5.000 GT.

"Jadi pelabuhan itu akan eksis nantinya kalau 5.000 GT kapal dengan 30 unit ini juga akan mendorong nantinya bagaimana kawasan industri itu menyiapkan 5.000 ton tiap kapal dikali dengan 30 itu," kata dia.

Sebagai gambaran saja, Kawasan Provinsi Maluku memiliki potensi sektor perikanan cukup baik. Di mana sumber potensi ikan di kawasan tersebut mencapai 4,66 juta ton per tahun. Angka ini sekitar 37 persen dari total 12,5 juta potensi ikan ada di Indonesia.

Sementara dari 37 persen potensi

perikanan tersebut, yang diperbolehkan ditangkap sekitar 3,73 juta ton per tahun. Dan dari 3,73 juta ton per tahun itu yang baru bisa diproduksi hanya sekitar 543 ribu ton saja. Artinya dari potensi yang bisa diambil 3,73 juta ton baru ditangkap hanya 14,45 persen saja.

Suryadi melanjutkan, pihaknya juga telah menyiapkan lahan untuk budidaya, baik udang maupun rumput laut dan sebagiannya. Penyediaan lahan ini diberikan bagi para investor yang tertarik untuk pengembangan di beberapa sektor tersebut.

"Untuk kawasan yang ada di pulau Seram itu sekitar 844 hektar ini bisa kita dorong untuk udang dan kepiting dengan potensi produksinya bisa 31 ribu ton per tahun," kata dia.

Kemudian juga ada di Seram Utara dengan dua tempat yang mencapai 402 hektar. Ini juga tengah disiapkan dengan kapasitasnya nanti produksinya bisa mencapai sekitar 14.000 ton per tahun. (*)



Menteri KKP: Kebijakan Zona Fishing Industri Akan Dibangun Tahun 2022



Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., pada hari Kamis 7 Oktober 2021 melaksanakan kunjungan kerjanya di Maluku. Dalam kunjungannya Menteri KP meninjau secara langsung Unit Pengolahan Ikan di PT. Maluku Prima Makmur.

Dalam kunjungan kerjanya, ia didampingi Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn). Drs. Murad Ismail, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, SH, PIh. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ir. Sadali Ie., M.Si, IPU, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Dr. Abdul Haris, S.Pi., M.Si, beserta dengan unsur terkait lainnya.

Untuk diketahui, Wilayah Maluku saat ini masuk dalam Zona 3, dimana kedepannya pada Tahun 2022 akan dibuat kebijakan Zona Fishing Industry, yang didalamnya akan dibagi menjadi 3 kuota Penangkapan.

"Kunjungan kali ini merupakan bagian dari Rute Kerja saya setelah dari Bitung, Biak, Tual, dan sekarang di Ambon. Kedepan kebijakan saya di tahun 2022, akan menjadi zona yang disebut Zona Fishing Industry, yang didalamnya dibagi menjadi 3 Kuota dalam penangkapan, yang pertama kuota untuk industri, yang kedua kuota untuk nelayan tradisional dan yang

ketiga kuota untuk hobi (memancing, red)," ujar Trenggono.

Ia menambahkan, hal tersebut guna mencegah terjadinya overfishing, yang merupakan akibat dari penangkapan yang tidak terukur, dimana dapat menyebabkan keberlanjutan populasi perikanan menjadi terancam.

"Inilah bagaimana pentingnya meregulasi, melaporkan, dan menjaga adanya unregulated fishing yang bukan hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga yang berada dari dalam negeri," tambahnya.

Menteri KKP juga mengatakan, manfaat kedua dari pelaksanaan kebijakan ini adalah guna menggeser industri perikanan yang selama ini berada di Pulau Jawa, menjadi industri perikanan di masing-masing wilayah.

Dia berharap, industri perikanan di Maluku dapat maju karena memiliki potensi yang luar biasa besar. Ia menambahkan melihat dari adanya pabrik kecil dimana terdapat banyak kendala, karena kesulitan bahan baku, maupun kendala rumpon yang tidak teratur, rebutan dengan nelayan, maka perlu ada regulasi yang akan dibuat, sehingga kedepannya sistem akan menjadi lebih baik.

"Karena pasar spesifik seperti tuna, udang, kerapu, marlin, dan sebagainya,

belum lagi ditambah dengan kepiting dan rumput laut seperti yang ada di Tual, maka akan diprogramkan pengembangan budidaya di wilayah Zona 3 untuk kepiting, kerapu, rumput laut, dan lobster. Saya berharap ketika penangkapan semakin sedikit, maka budidaya akan semakin meningkat," harapnya.

Nantinya, lanjut dia, kapal-kapal yang terdaftar untuk menangkap di zona 3 harus menangkap di zona 3 saja, karena akan dibangun pelabuhan di Ambon, Tual dan di Merauke, dimana ketiganya telah memenuhi syarat.

"Namun untuk pusat ekspor tetap harus ada di Ambon, dimana kapal-kapal akan diawasi dengan teknologi satelit, baik untuk kapal tradisional maupun kapal industri akan dipasang alat, sehingga dapat dimonitor. Apabila ada yang tidak terpasang alat itu, dapat dipastikan bahwa kapal itu ilegal dan akan ditangkap," jelasnya.

Menurutnya, jika pengawasan dapat ditingkatkan dan dilakukan oleh semua pihak secara terintegrasi, maka industri perikanan akan cepat berkembang. "Saya berharap lima sampai sepuluh tahun yang akan datang, Kota Ambon akan menjadi kota satelit yang hebat," tutupnya. (*)

Maluku Ekspor Perdana 15 Ton Komoditi Damar ke Bangladesh



Plh. Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, melepas ekspor komoditi damar perdana PT. Parshu Indonesia dengan negara tujuan Bangladesh, di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon.

Kegiatan tersebut dihadiri Plh. Kepala Kantor Bea Cukai Ambon Dwi Yogo Hardianto, perwakilan Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku Leni Nurlaini, Pimpinan PT Parshu Indonesia Ketut Mulyadi, Kepala Bidang Pemasaran PT. BNI Amin Tohari, dan perwakilan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan unsur terkait lainnya.

Ekspor Maluku dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam setiap periode, sebagaimana sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Plh. Sekda.

Dapat diketahui pada bulan Maret dan April 2021, Maluku melakukan ekspor langsung perdana komoditi perkebunan yaitu pala sebanyak 56.04 ton. Pada kesempatan tersebut, ia menambahkan Provinsi Maluku kembali melakukan langkah baru dengan melakukan diversifikasi pasar ekspor terutama untuk komoditi kehutanan, khususnya damar Maluku dimana sebanyak 15 ton diekspor oleh PT. Parshu Indonesia yang merupakan hasil hutan dari pulau seram.

Sadli menyampaikan dengan ekspor perdana sebanyak 15 ton tersebut, berarti bahwa komoditi non migas di Maluku tidak hanya tertumpu pada sektor perikanan dan perkebunan, tetapi juga merambah pada sektor-sektor lain terutama sektor kehutanan khususnya komoditi damar.

Dia berharap, para eksportir bisa melakukan inovasi kedepannya dan lebih jeli membaca peluang untuk meningkatkan jumlah ekspor.

Plh. Sekda Maluku ini juga menyampaikan selain damar, eksportir juga bisa mengembangkan hasil hutan lainnya seperti rotan, karena dengan peningkatan jumlah ekspor hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Maluku. (*)

Wujudkan LIN, Menko Luhut Minta Perkuat Kolaborasi di Maluku

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong pembangunan Ambon New Port atau Pelabuhan Ambon Baru di Maluku. Menurutnya, sentuhan dari pemerintah pusat diperlukan untuk menyelesaikan masalah pembangunan.

"Saya ke sini untuk mendengar langsung permasalahan dan menentukan langkah selanjutnya, karena Ambon butuh dukungan pemerintah pusat," katanya, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian, Jumat 8 Oktober 2021.

Pembangunan Ambon New Port dinilai sangat diperlukan, mengingat lokasi Pelabuhan Ambon saat ini berada di daerah pusat perdagangan, pemukiman, dan fasilitas umum lainnya, sehingga tidak bisa dikembangkan lebih luas.

Ambon New Port nantinya akan diintegrasikan dengan pusat kegiatan perikanan dan dirancang untuk mewujudkan Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN). Program ini didorong agar dapat meningkatkan jumlah ekspor dan dalam jangka panjang memunculkan efek berganda yang menyejahterakan masyarakat.

Luhut menyebutkan, ada beberapa masalah pelabuhan Ambon yang ada saat ini, seperti pelabuhan kargo dan petikemas yang ada akan mencapai

kapasitas maksimum dalam 10-15 tahun mendatang. Serta, padatnya akses keluar dan masuk Teluk Ambon, dan pelabuhan perikanan yang telah melebihi kapasitas. Oleh karena itu, lanjutnya, Ambon membutuhkan pelabuhan baru dengan konsep terintegrasi.

Selanjutnya, pihaknya akan mengadakan pertemuan secara virtual untuk membahas progres pembangunan Pelabuhan Ambon baru.

"Ini sudah direncanakan dari 11 tahun lalu, dan Bapak Presiden ingin agar ini segera selesai. Jangan jadi yo-yo lagi," pesannya.

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, mengatakan, pelabuhan ini sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dibangun dengan skema APBN ditambah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Tetapi dalam implementasinya, kita harus rangkul Pelindo IV dalam program KPBU," ujarnya.

Rencananya, pada bulan Desember 2021 akan dilaksanakan groundbreaking pelabuhan. Dengan demikian, pembangunan bisa segera dimulai.

Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, lahan untuk pembangunan proyek ini sejak adanya Peraturan Presiden mengenai percepatan pembangunan pelabuhan.

"Ini pun menjadi pemantik bagi kami, pemerintah daerah, karena tiga dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dapat ditemukan di Maluku," katanya.

Murad menjelaskan pelabuhan ini diharapkan mampu menjadi pusat beberapa kegiatan, antara lain terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal ro-ro, pelabuhan perikanan, kawasan industri logistik, terminal Liquefied Natural Gas (LNG) dan pembangkit listrik. Kemudian, untuk pendanaan tahun 2022-2024 akan memanfaatkan maritime fund atau biaya dari sektor privat.

Pelabuhan Ambon Baru berdiri di perbatasan Desa Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon. Lahan yang telah disediakan seluas 700 hektare. Skema investasi pelabuhan akan menggunakan skema KPBU mencapai Rp 5 triliun.

Luhut juga meminta agar PT PLN bantu mencari potensi pemanfaatan energi baru terbarukan dari gelombang laut, geothermal, dan angin di Maluku.

Perlu diketahui, Maluku juga memiliki potensi gas untuk menjadi sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 500 Mega Watt (MW). Sementara itu, PT PLN siap mendukung 40 MW untuk kebutuhan Pelabuhan Ambon Baru dari jumlah potensi listrik sebanyak 100 MW. (*)



Foto: Istimewa



Jokowi Menghadiri KTT G20 Roma

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Roma, Italia. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 30-31 Oktober 2021, dan dihadiri oleh para pemimpin negara anggota G20.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi membahas berbagai isu dan masalah global bersama dengan pemimpin negara lainnya. Jokowi membahas tentang isu perubahan iklim, dan dampaknya secara global, serta mengajak semua negara untuk bekerja sama dalam penanganan perubahan iklim. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia ingin G20 menjadi contoh dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata.

Jokowi juga menambahkan tentang konsistensi komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Saat negara lain mengalami kebakaran hutan yang hebat, Indonesia telah berhasil melakukan penurunan deforestasi dan kebakaran hutan sebanyak 82 persen.

“Saya paham sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010-2019.”



Kata Jokowi.

Selain membahas isu perubahan iklim, Jokowi juga membahas mengenai isu kesehatan global. Jokowi juga kembali mengajak semua negara untuk memperkuat arsitektur kesehatan global dengan tujuan untuk membangun dunia yang lebih tahan terhadap pandemi dan berbagai guncangan di masa depan. Jokowi menilai bahwa dukungan keuangan internasional untuk menangani isu kesehatan sangatlah penting. Menurutnya, mekanisme penggalangan sumber daya Kesehatan global harus disusun, termasuk dana vaksin, obat, alat Kesehatan, hingga tenaga Kesehatan yang siap diterjunkan setiap saat untuk membantu negara yang mengalami krisis Kesehatan.

Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 dalam sesi penutupan

KTT G20 Roma yang berlangsung pada Minggu, (31/10/2021). Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Jokowi memberi selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Posisi ini pertama kalinya dipegang oleh Indonesia. Presidensi G20 akan berupaya mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi di dunia dengan tema besar “Recover Together, Recover Stronger”. KTT G20 selanjutnya akan dilaksanakan di Bali.

“Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak, Ibu, di ruang terbuka, di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G-20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih,” ucap Jokowi. (*)



UEA Berinvestasi 468 Triliun Rupiah di Indonesia

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA) dalam rangka komitmen bisnis antar kedua negara telah menghasilkan kesepakatan investasi senilai US\$32,7

miliar atau Rp468 triliun. Nilai tersebut didapat dari 19 perjanjian kerjasama yang menjadi salah satu bahasan saat Jokowi bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheik Mohamed Bin Zayed

Al Nahyan (MBZ) di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi.

Kesepakatan investasi dan komitmen bisnis tersebut antara lain adalah kerja sama antara Indonesia Investment Authority (INA) dengan Abu Dhabi Growth Fund (ADG), INA dan DB World, floating solar panel antara Masdar dan Pertamina, refinery Balikpapan, manufaktur dan distribusi vaksin dan bio product. Ada pula berbagai kesepakatan G42 dengan mitra di Indonesia, antara lain di bidang smart cities, telekomunikasi, pengembangan laboratorium genomic, dan lain sebagainya.

Selain membicarakan tentang investasi, kedua negara juga membahas mengenai perdagangan, travel corridor arrangement (TCA), komitmen membangun kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan Ibu Kota baru Indonesia, serta isu lingkungan. Isu perubahan iklim juga disoroti, sang pangeran turut mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan reservasi dan rehabilitasi hutan mangrove.

Di bidang perdagangan, kedua negara berharap perundingan negosiasi Perjanjian Ekonomi Komprehensif (CEPA) diharapkan dapat segera diselesaikan. Jokowi menargetkan bahwa pada Maret 2022 perundingan tersebut akan rampung. (*)





Selamat

Kepada

**GUBERNUR MALUKU
BESERTA JAJARAN PEMPROV MALUKU**

atas diraihnya penghargaan

ANUGERAH LAYANAN INVESTASI TERBAIK 2021

Kategori Penghargaan Khusus Indonesia Timur
dari Presiden RI Bapak Joko Widodo



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
HIPMI MALUKU



AZIS TUNNY

Ketua Umum BPD HIPMI Maluku



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku